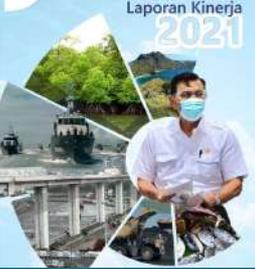
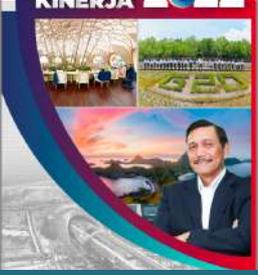




LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

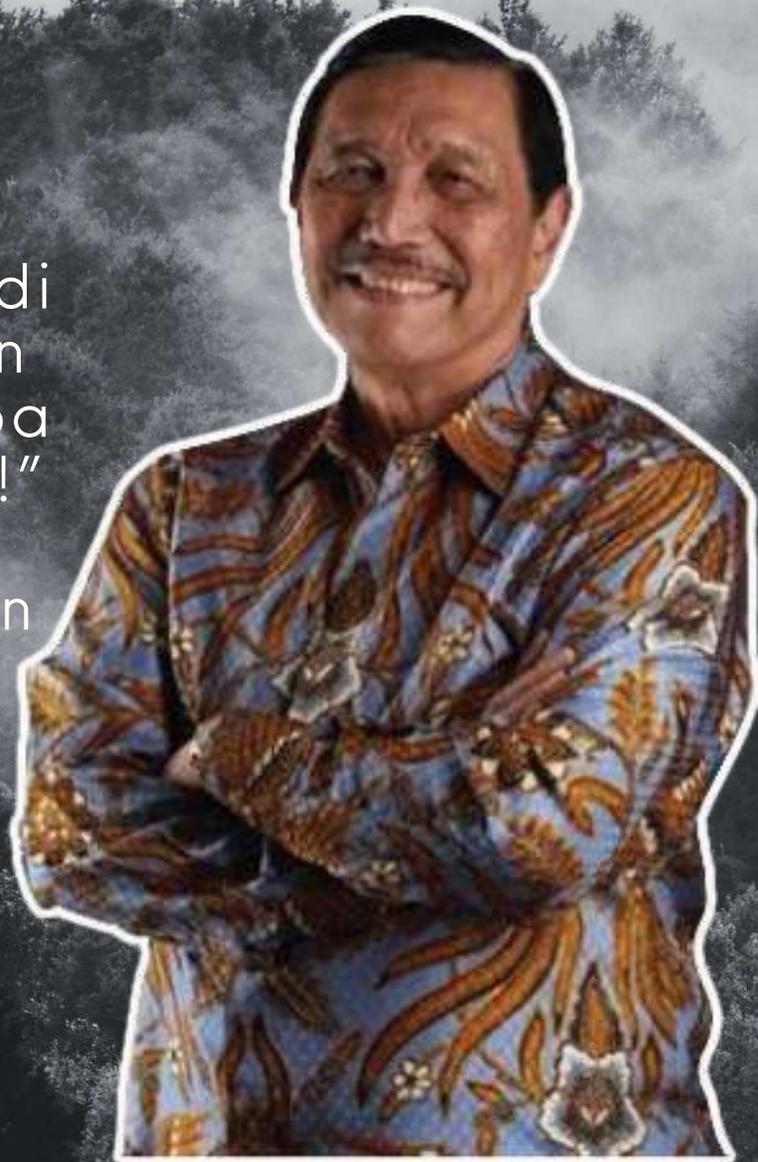
**KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI**



	2019			
			2020	
		2021		
				2022
2023				

"DISIPLIN adalah modal utama menjadi seorang JUARA, dan seorang JUARA tanpa disiplin is NOTHING!"

- Luhut B. Pandjaitan



Arahan Menteri Koordinator



Luhut B. Pandjaitan



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Sejak Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan sebanyak 32 penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo berupa program strategis nasional, program prioritas presiden dan Major Project, antara lain Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB), Food Estate, Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (TP3DN), Pengelolaan Rumput Laut, gelaran FI Powerboat di DPSP Danau Toba, Tata Kelola Sampah, Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States Forum (KTT AIS Forum), lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Bangsa Buatan Indonesia (BBI), Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), dan lainnya. Beberapa penugasan tersebut telah sukses dan selesai dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan serta memiliki capaian yang maksimal. Hal ini berkat sinergi kerja sama dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah/swasta, serta masyarakat yang terlibat.

Perhelatan FI Powerboat telah menghasilkan dampak ekonomi yang besar, yaitu sekitar Rp391 miliar. Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah berhasil mendorong peningkatan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pemerintah sebesar Rp1.303 triliun, meningkat 50% dari tahun 2022 yang sebesar Rp866 triliun. Peningkatan jumlah produk di e-katalog pada tahun 2023 menjadi 7,4 juta. Pengurangan sampah laut tahun 2023 tercapai sebesar 37,74%. Sementara itu, budidaya rumput laut telah mencapai luas sebesar 102.000 ha, diharapkan kedepan luasan ini bisa bertambah.

Diresmikannya KCJB oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023 menjadi momentum kebangkitan transportasi di Indonesia dan menjadi peradaban baru menuju Indonesia Maju 2045. KCJB menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara, momentum ini tentunya menjadi pemantik untuk terus bekerja bersama dan berkolaborasi demi kemajuan bangsa Indonesia.

Gelaran AIS Forum telah sukses diselenggarakan dan dipimpin langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Forum ini bersama-sama untuk mengatasi permasalahan global antara lain: mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut dan tata kelola maritim yang baik, tentunya ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua stakeholder guna kemajuan bangsa ini.





Apresiasi disampaikan untuk anak bangsa atas karya dan keberhasilannya dalam pembangunan infrastruktur (jalan-jembatan-bendungan – jalan tol – bandara – pelabuhan dll) menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa lokasi dari pembangunan infrastruktur telah diresmikan di tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo dan telah difungsikan.

Transisi menuju KBLBB segera terwujud dengan beberapa kebijakan dari pemerintah. Penggunaan KBLBB juga diharapkan mampu mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan KBLBB di Indonesia sangat beralasan karena ketersediaan bahan baku yang melimpah. Hilirisasi akan lengkap bila tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan critical minerals dan industri baterai. Hal ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, teknologi baru, inovasi, dan meningkatkan pendapatan negara.

Enam agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia yakni hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, distribusi ekonomi, dan dekarbonisasi menjadi fokus saat ini. Agenda ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku, mendorong industrialisasi, dan menyebarkan pembangunan di Wilayah Indonesia Timur. Perekonomian Indonesia akan bertransformasi menjadi industri hilirisasi dan tidak lagi bergantung pada raw commodities. Kebijakan hilirisasi ke depan, yakni membangun basis industri bernilai tambah tinggi untuk mendukung digitalisasi perekonomian yang semakin pesat dan tren ekonomi hijau.

Kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) guna pelaksanaan rehabilitasi dan penanaman mangrove sepanjang tahun 2023 telah sukses dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan berbagai negara sahabat, perusahaan, serta lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan guna mewujudkan perlindungan penduduk pesisir yang rentan bencana alam dan perubahan iklim. Harapannya akan tumbuh benteng hijau di pesisir Indonesia yang sekaligus menjadi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan 5 DPSP (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang) yang menjadi prioritas pemerintah, tahun 2023 progres pembangunannya secara keseluruhan telah dari 101 isu di 5 DPSP 98,2% sudah dalam status 'selesai'. hal ini tentunya menjadi kebangkitan tumbuhnya perekonomian di wilayah-wilayah tersebut.

Suksesnya gelaran KTT ASEAN dan AIS Forum di tahun 2023 membawa dampak yang luas dan mempengaruhi ekonomi masyarakat secara signifikan. Momentum ini menjadi kebangkitan Indonesia, hal ini terbukti beberapa negara asing sangat ingin menanamkan modal di Indonesia. Secara keseluruhan nilai investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, hal ini membanggakan kita semua. Realisasi PMA di Luar Jawa terus meningkat, kebijakan hilir mendorong industrialisasi di Indonesia Timur. Share realisasi PMA di Luar Jawa 52% berbanding dengan Pulau Jawa (48%). Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.

Komitmen Indonesia untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi adalah landasan untuk membangun tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Selain itu juga fokus terhadap digitalisasi yang mencakup perluasan akses internet berkecepatan tinggi dan konektivitas ke daerah-daerah terpencil, serta menempatkan Indonesia sebagai tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Tahun 2025 nilai ekonomi digital Indonesia ditargetkan bisa mencapai US\$146 miliar.

Menyongsong kebangkitan menuju Indonesia Maju 2045, pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangkap dan merealisasikan peluang tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan krisis dan ekonomi terus membaik. Rencana pembangunan, penyusunan strategi dan modifikasi kebijakan, merupakan bentuk upaya yang terus dilakukan untuk kebangkitan Negeri ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan kemaritiman dan investasi. Menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia tetap menjadi tujuan besar kita. Apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengawal pembangunan kemaritiman dan investasi. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan informasi bagi semua pihak. Masukan dan saran sangat kami harapkan untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan kemaritiman dan investasi.



Kata Pengantar



Odo R.M. Manuhutu



Penyusunan Laporan bertujuan untuk menilai tingkat capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) atas penggunaan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama Tahun 2023. Penyusunan Laporan ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan kinerja ini menyajikan pencapaian IKU yang memiliki target pada Tahun 2023, perbandingan dengan capaian akhir tahun dan perbandingan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi yang merupakan fungsi utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan atas koordinasi yang baik. Diharapkan informasi yang disajikan ke depan semakin berkualitas.

Plh. Sekretaris Kemenko



Odo R.M. Manuhutu





Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023.

Laporan ini menjelaskan pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Perjanjian Kinerja Tahun Kemenko Marves merupakan hasil reviu Renstra sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Kemenko Marves tahun 2020 dan 2021, dimana perlu dilakukan penajaman indikator kinerja utama (IKU) Kemenko Marves.

Hasil reviu, kinerja Kemenko Marves terbagi ke dalam 3 (tiga) level *outcome* yaitu *Ultimate outcome*, *Immediate outcome* dan *Intermediate outcome*. Perubahan SS dan IKU yang mengalami perubahan pada dokumen PK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023.

IKU Kemenko Marves Tahun 2023 secara keseluruhan sampai akhir tahun 2023 berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja Kemenko Marves Tahun 2023 sebesar 99,96%.

LKj tahun 2023, Kemenko Marves menyampaikan capaian pelaksanaan dari RB Tematik, hal ini sesuai dengan arahan dari KemenPANRB bahwa pemerintah telah menyusun konsep Reformasi Birokrasi yang baru yang dinamakan RB Tematik. 4 fokus RB tematik dengan konsep yang baru seperti Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Layanan Pemerintahan; serta Mendukung Program Presiden.





Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong peningkatan investasi, agar tidak ada disparitas investasi antara Jawa dan Luar Jawa. Secara keseluruhan nilai investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, hal ini membanggakan kita semua. Realisasi PMA di Luar Jawa terus meningkat, kebijakan hilir mendorong industrialisasi di Indonesia Timur. Share realisasi PMA di Luar Jawa 52 Persen berbanding dengan Pulau Jawa (48%). Capaian tersebut melampaui target (101,3 persen) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.

Kemenko Marves dalam pelaksanaan RB Tematik terdiri dari 4 fokus dan 42 kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023. Pelaksanaan RB tematik selama tahun 2023 berjalan sesuai dengan perencanaan. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun tidak menghambat pencapaian target.

Pagu anggaran Kemenko Marves tahun anggaran 2023 sebesar Rp341.990.713.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp338.940.911.012,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas rupiah) atau 99,11%.



Daftar Isi

Arahan dan Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

01. Pendahuluan

13. Perencanaan Kinerja

18. Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Tahun 2023
- RB Tematik
- Capaian Kinerja Lainnya
- Inovasi
- Prestasi
- Realisasi Anggaran
- Analisis Sumber Daya

04. Penutup





Pendahuluan

LKJ KEMENKO MARVES TAHUN 2023

Tugas & Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kematriman dan investasi. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.



Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kematriman dan investasi;

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kematriman dan investasi;

Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kematriman dan investasi;

Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;

Penyelesaian isu di bidang kematriman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Marves;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Fungsi





Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi :

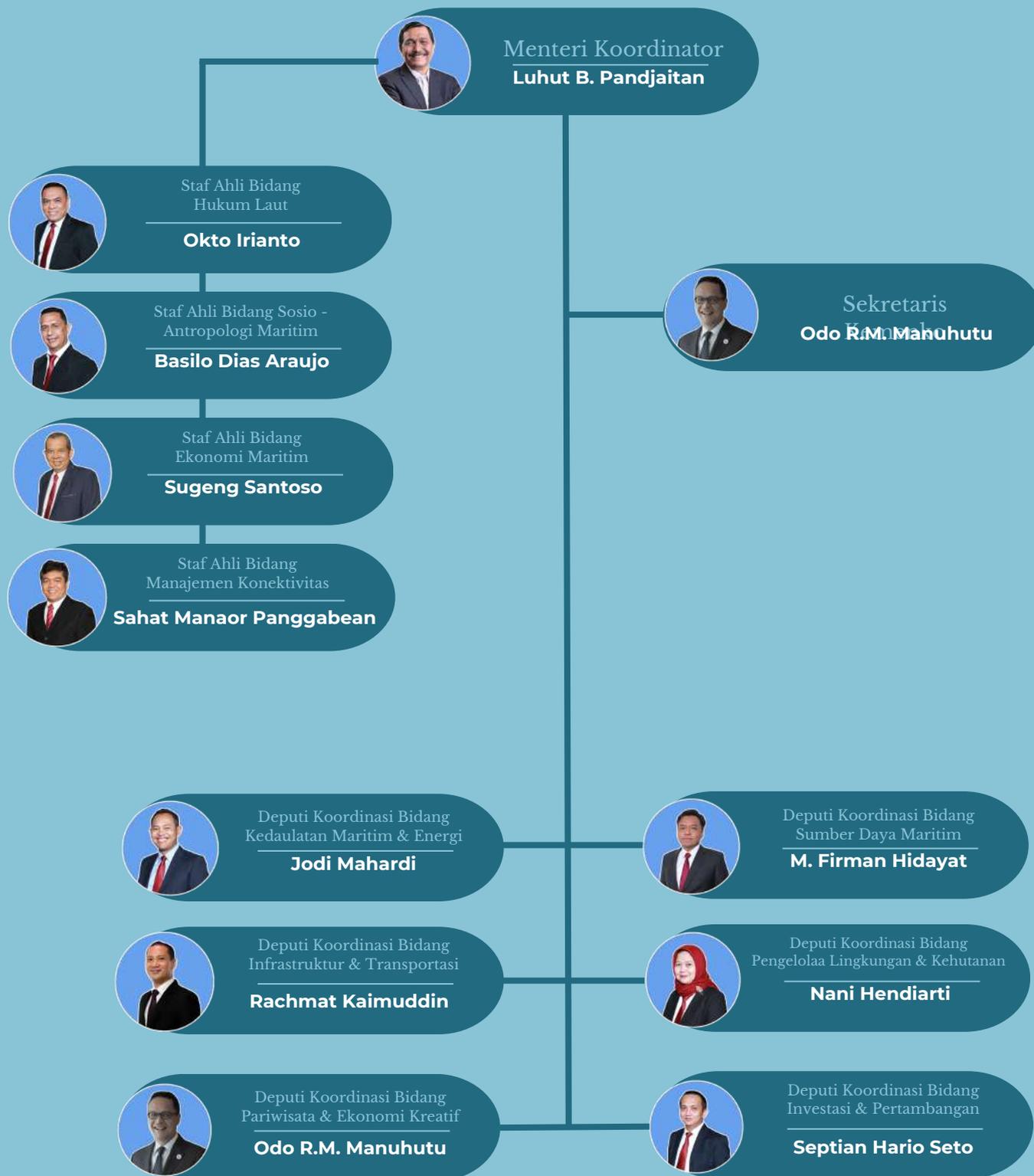
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.



Struktur Organisasi

Eselon I Kemenko Marves

Perpres Nomor 92 Tahun 2019



Tugas & Fungsi Unit Kerja Kemenko Marves



Sekretariat Kemenko

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves.

Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim.

Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur & Transportasi

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi.

Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan & Kehutanan

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Deputi Koordinasi Bidang Investasi & Pertambangan

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Staf Ahli

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri koordinator sesuai keahliannya.

Inspektorat

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenko Marves.



Peran Strategis



3 (tiga) mandat langsung dari Presiden Jokowi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi yaitu:

- Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”;
- Menangani hambatan-hambatan investasi; dan
- Merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar.

Selain itu peran koordinasi Kemaritiman dan Investasi dalam RPJMN 2020-2024, Kemenko Marves fokus pada 5 Agenda Pembangunan di RPJMN dan 5 Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

Bidang Ekonomi

Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

Misi 2:
Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

Misi 5:
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

Misi 6:
Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari

Misi 7:
Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2020-2024*

- Agenda Pembangunan 1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- Agenda Pembangunan 2** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Merajamin Pemerataan
- Agenda Pembangunan 5** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Agenda Pembangunan 6** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Agenda Pembangunan 7** Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Peraturan Presiden 23/2020 tentang RPJMN 2020-2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH

- Prioritas Nasional 1**
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PP	KP
7	27
- Prioritas Nasional 2**
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Merajamin Pemerataan (Peningkatan Kualitas Kota ke Kota pada Rencana RPJMN 2022-TV IV)

PP	KP
4	17
- Prioritas Nasional 5**
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PP	KP
2	8
- Prioritas Nasional 6**
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PP	KP
2	3
- Prioritas Nasional 7**
Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PP	KP
2	3

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah 2024





Tugas

Menko Marves

Energi

- Meningkatkan produksi migas dalam negeri
- Implementasi dan kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT) juga harus dipercepat

Industri dan Maritim

- Pengurangan pada barang-barang impor
- Tidak mengekspor bahan mentah
- Mengembangkan produk-produk petrokimia dan membangun kawasan petrokimia

Infrastruktur dan Konektivitas

- Penambahan proyek
- Peningkatan frekuensi
- Pengendalian monopoli terhadap pasokan
- Penurunan biaya logistik dan biaya transportasi

Pariwisata

- Fokus/konsentrasi pada 5 lokasi, baik itu infrastrukturnya, kalender, event, perbaikan produk berbasis ekonomi rakyat
- Target akhir tahun 2020, semua aspek yang mendukung sektor pariwisata harus selesai, antara lain: infrastruktur, pelabuhan, produk-produk wisata, dan kalender event serta kondisi lingkungan yang menunjukkan sebagai kawasan wisata

Investasi

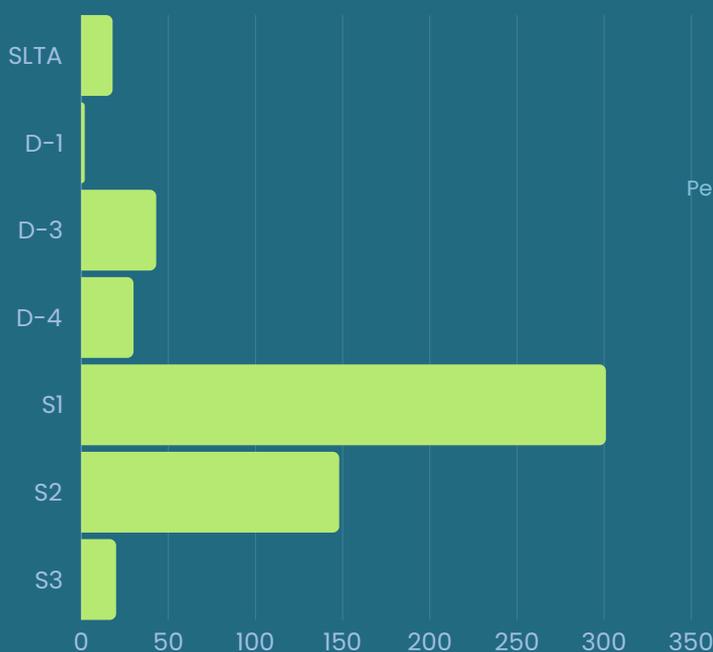
- Fokus penyiapan program-program terobosan untuk mengatasi neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan
- Pastikan pada peningkatan investasi terus dilakukan
- Iklim investasi harus kita bangun dan benahi



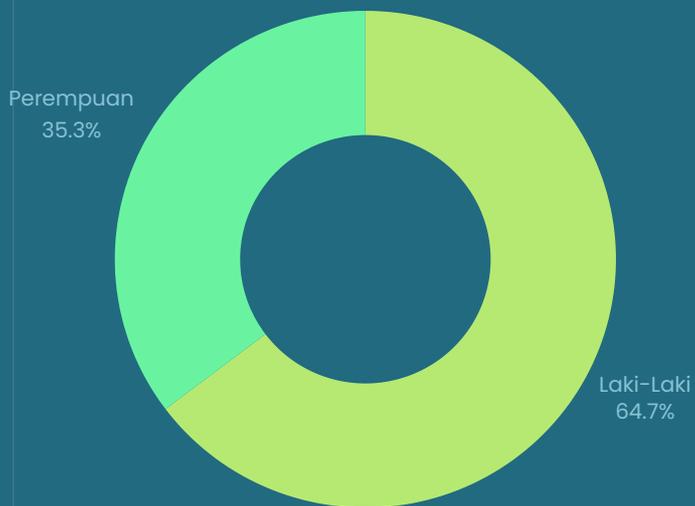


Sumber Daya Pegawai Kemenko Marves

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

Perempuan	258 orang
Laki-Laki	473 orang
Total	730 orang

Sumber Daya

Anggaran Tahun 2023

53,31%

Rp182.302.379.000,00

Program Dukungan Manajemen

46,69%

Rp159.688.334.000,00

Program Koordinasi Dukungan Kebijakan

100%

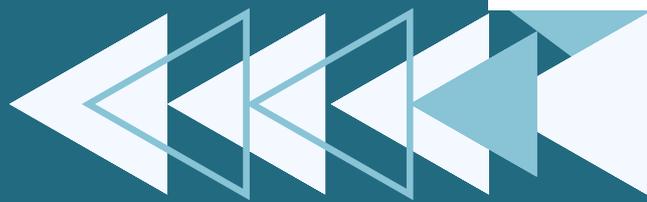
Rp341.990.713.000,00

Total Anggaran



Pagu Anggaran

Belanja Tahun 2023



Rp77.300.611.000,00

Belanja Pegawai

22,60%

Rp262.155.281.000,00

Belanja Barang

76,66%

Rp2.534.821.000,00

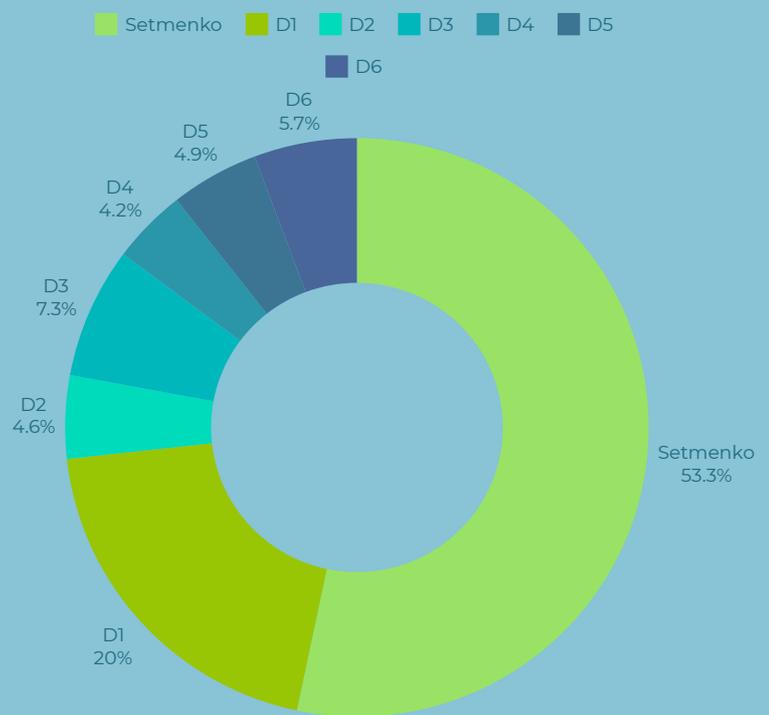
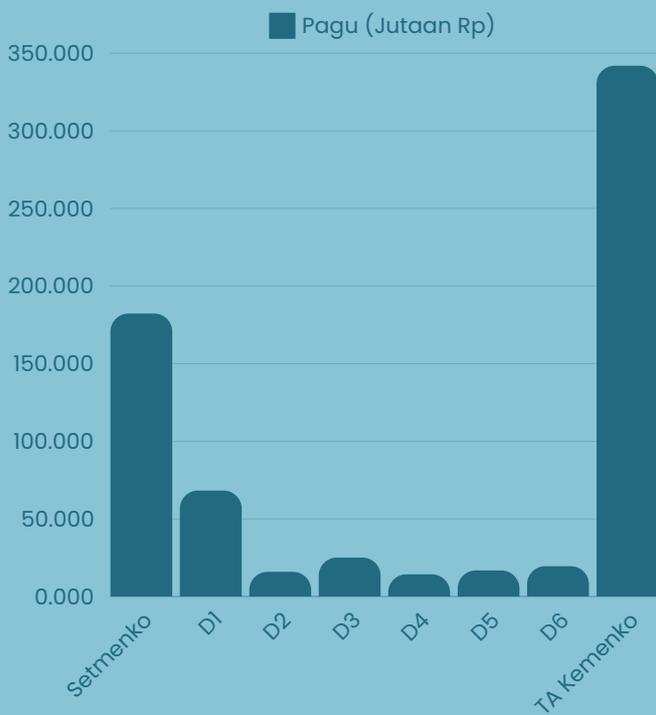
Belanja Modal

0,74%



Pagu Anggaran

Per Unit Kerja Eselon I



Pagu

Setmenko	182.302.379.000,00
D1	68.244.583.000,00
D2	15.859.820.000,00
D3	25.056.272.000,00
D4	14.262.811.000,00
D5	16.767.416.000,00
D6	19.497.432.000,00

Kemenko

341.990.713.000,00



Sistematika Penyajian



Bab 1

Penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

Bab 2

Diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2023, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi

Bab 3

Realisasi kinerja Kemenko Marves telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

Realisasi Anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja lainnya capaian kinerja lainnya meliputi:

- Tugas Tambahan program dan kegiatan Kemenko Marves;
- Capaian RB Tematik dan capaian kinerja lainnya;
- Inovasi;
- Prestasi

Bab 4

Kesimpulan atas pencapaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

Lampiran

Perjanjian kinerja tahun 2023, kegiatan tahun 2023 penghitungan pencapaian IKU unit kerja, Data dukung lainnya terhadap pencapaian IKU..





Perencanaan Kinerja

LKJ KEMENKO MARVES TAHUN 2023

Rencana Strategis

VISI 2020–2024

Presiden & Wakil Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kemenko Marves

“Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”



MISI

-  Peningkatan kualitas manusia Indonesia
-  Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
-  Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
-  Mencapai lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
-  Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

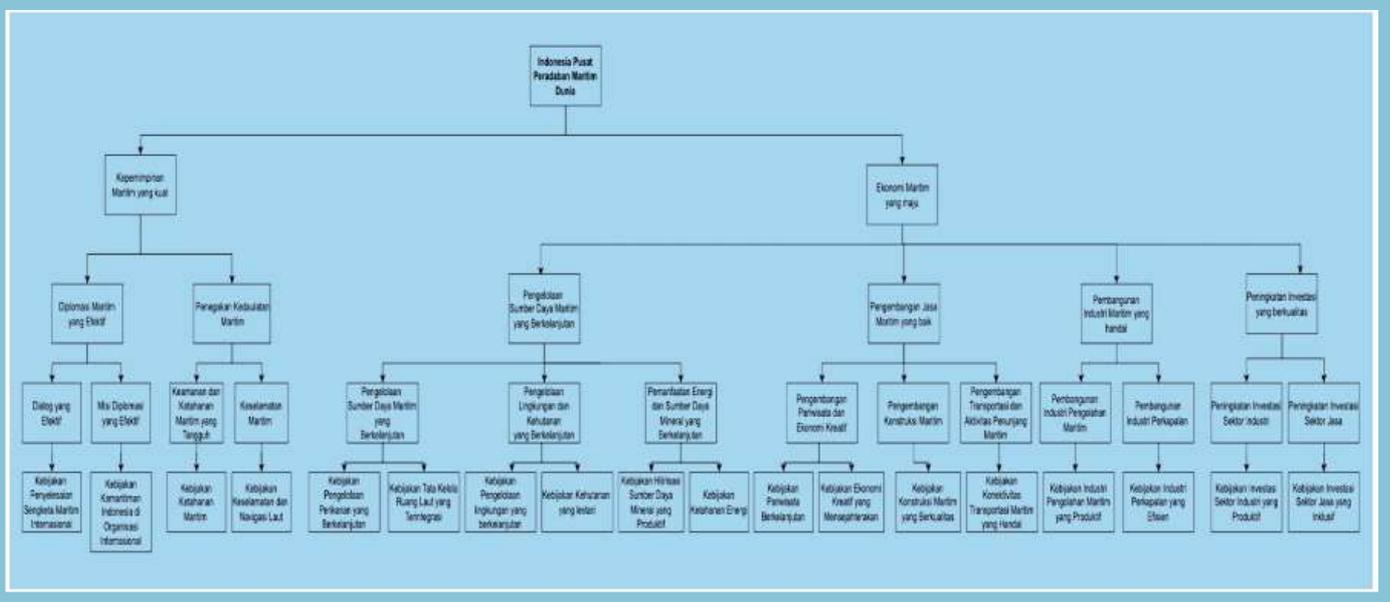
TUJUAN

- Meneguhkan jatidiri Indonesia sebagai negara maritim dan berdaulat
- Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekonomian nasional
- Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur
- Meningkatkan tatakelola Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi

SASARAN

- Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional
- Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis
- Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia
- Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam
- Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter, dan berbudaya nusantara

Pohon Kinerja



Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama

1

Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing

- Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)
- Indeks Kepemimpinan Maritim

2

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif Dan Efisien

- Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti
- Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan

3

Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas

- Indeks RB Kemenko Marves

Program & Kegiatan

Tahun 2023



2 Program dan 6 Kegiatan

Program dan Kegiatan	Anggaran	%
Program Dukungan Manajemen	182.302.379.000,00	53,31
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	159.688.334.000,00	46,69
Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	68.244.583.000,00	19,96
Koordinasi Sumber Daya Maritim	15.859.820.000,00	4,64
Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	25.056.272.000,00	7,33
Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	14.262.811.000,00	4,17
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16.767.416.000,00	4,90
Koordinasi Investasi dan Pertambangan	19.497.432.000,00	5,70
TOTAL	341.990.713.000,00	100

Pagu Anggaran Definitif Kemenko Marves sebesar Rp333.066.772.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), kemudian mendapatkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp8.923.941.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), sehingga jumlah anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 sebesar Rp341.990.713.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah),



Perjanjian Kinerja

Tahun 2023

Target IKU*

7,7	≥ 3	100%	100%	80
Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	Indeks Kepemimpinan Maritim	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan	Indeks RB Kemenko Marves

Predikat Organisasi

Predikat Organisasi	NKO**
 Istimewa	100 < NKO ≤ 120
 Baik	90 ≤ NKO ≤ 100
 Butuh Perbaikan	70 ≤ NKO < 90
 Kurang	50 ≤ NKO < 70
 Sangat Kurang	< 50

*) IKU = Indikator Kinerja Utama
 **) NKO = Nilai Kinerja Organisasi



Akuntabilitas Kinerja

LKJ KEMENKO MARVES TAHUN 2023



Capaian Kinerja Tahun 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI | NKO

Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023 adalah sebesar 99,96%.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target dengan capaian Kemenko Marves, diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 adalah sebesar **99,96%**



IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	%	7,7	7,92	102,86
Indeks Kepemimpinan Maritim	Nilai	≥3	3	100
Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan	%	100	100	100
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Nilai	80	76,78*	95,98

*)capaian tahun 2022, Indeks RB tahun 2023 KemenPANRB belum mengeluarkan hasil penilaian RB



**NKO Tahun
2023**

99,96%

Realisasi Anggaran



Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp338.940.911.012,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp341.990.713.000,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) atau 99,11 %

Realisasi tertinggi pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebesar Rp15.859.820.000,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp15.852.885.092,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) atau 99,96%.

Realisasi Anggaran
Kemenko Marves

99,11%

Realisasi Anggaran
Tertinggi D2

99,96%

Belanja Pegawai

Rp77.300.611.000,00

96,71%

Realisasi

Rp74.683.240.327,00

Belanja Barang

Rp262.155.281.000,00

99,81%

Realisasi

Rp260.680.693.795,00

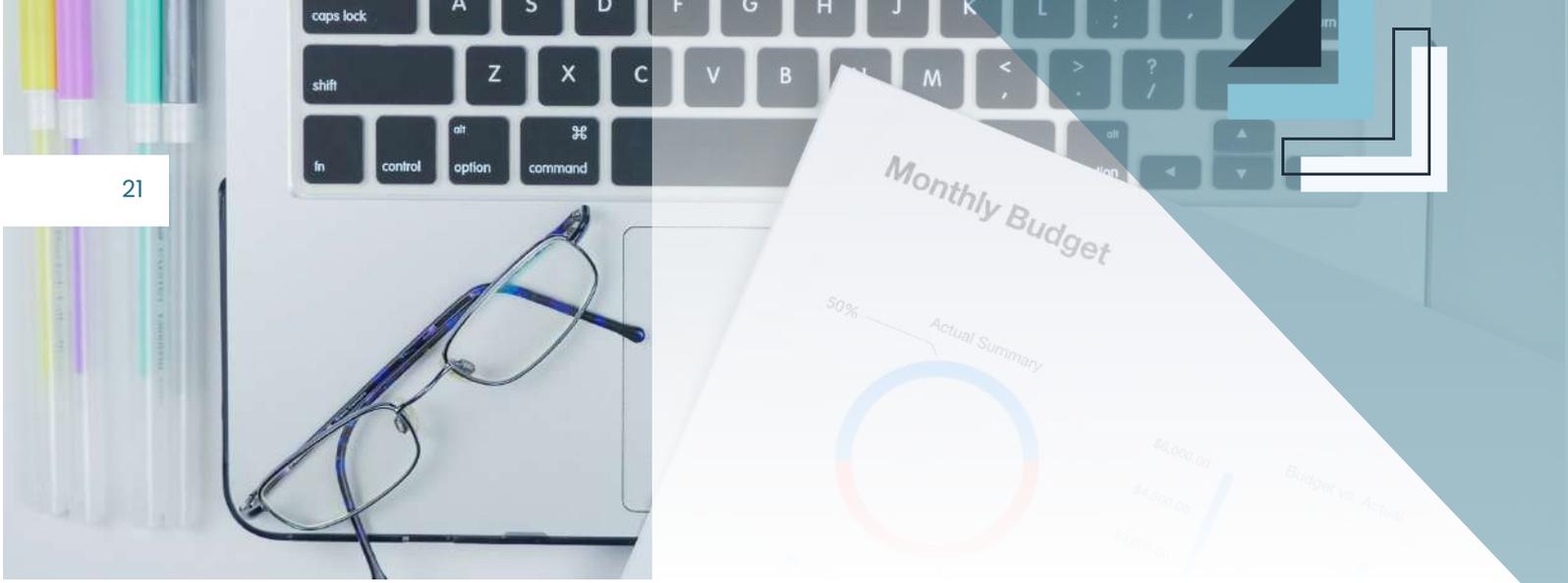
Belanja Modal

Rp2.534.821.000,00

99,83%

Realisasi

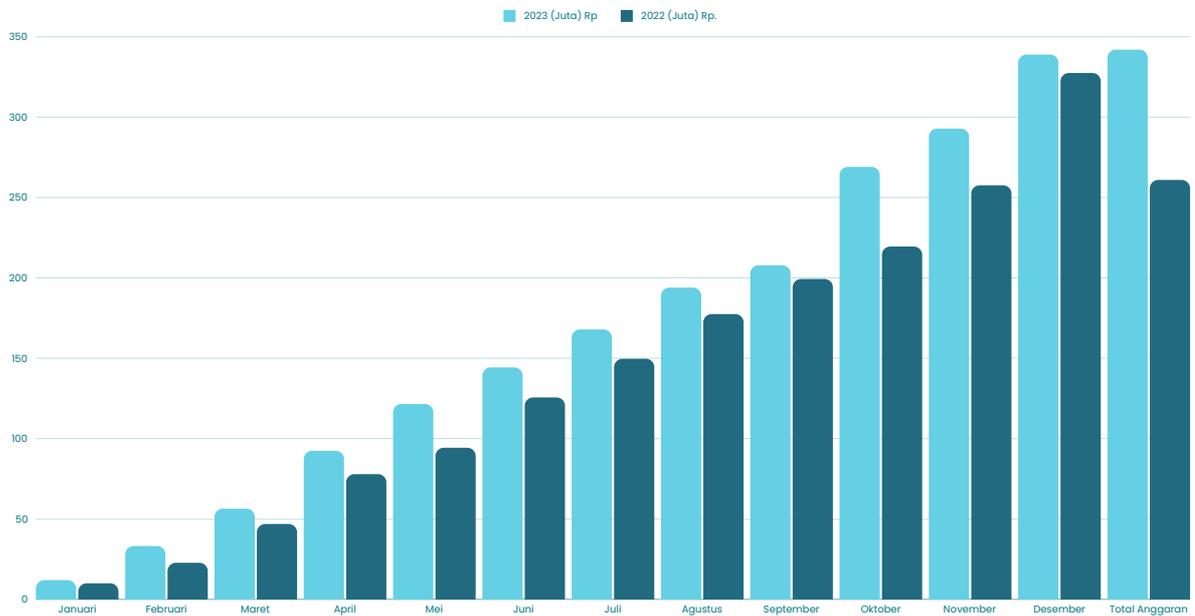
Rp2.530.545.866,00



Perbandingan Pagu - Realisasi Anggaran 2015 - 2023



Sumber: Aplikasi SMART, 2023



Sumber: Biro Umum, 2023

Analisa Kinerja

SS 1: Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing

Sasaran yang ingin dicapai dari SS 1 adalah Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing, yakni adalah Suatu kondisi tercapainya pembangunan kemaritiman yang berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim yang mandiri dan memiliki kedaulatan penuh serta terwujudnya peningkatan iklim investasi positif di Indonesia. Sasaran Strategis ini menggunakan indikator kinerja utama (IKU) :

1 IKU Kontribusi PDB Maritim Terhadap PDB Nasional

PDB Kemaritiman merupakan kondisi ketika pengelolaan semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan di daratan lahan atas yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan yang kuat sebagai penggerak perekonomian nasional telah terwujud.

PDB Kemaritiman adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim. PDB Kemaritiman sebagai salah satu pilot project Satu Data Indonesia hal ini tertuang dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia).



ULTIMATE OUTCOME

Memiliki bobot sebesar 0,4 dari target capaian total, yang terdiri dari 1 SS dan 2 IKU. SS tersebut yaitu:

Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing





2 IKU Indeks Kepemimpinan Maritim.

Indeks ini menggambarkan kepemimpinan nasional yang mampu mengelola sumber daya maritim dan kelautan untuk kemakmuran bangsa dan negara. perlunya Penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global perlu dilakukan melalui penguatan Diplomasi maritim, yang dapat diwujudkan dengan cara:

1. Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Negara Pulau dan Kepulauan (*Archipelagic and Island States Forum*),
2. Partisipasi Aktif dalam Forum Maritim regional dan global;
3. Penempatan wakil Indonesia di IGO (*International Governmental Organisation*) Kemaritiman;
4. Percepatan Perundingan Batas Maritim,
5. *Hosting event* regional dan internasional bidang kelautan, dan
6. Peningkatan inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

“ Indeks kepemimpinan maritim merupakan hasil dari penegakan kedaulatan maritim dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman

Capaian

IKU Kontribusi PDB Maritim Terhadap PDB Nasional

Kontribusi PDB maritim terhadap PDB Nasional adalah besaran kontribusi nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim terhadap ekonomi nasional.

PDB Maritim merupakan alat ukur yang secara khusus mengukur kinerja ekonomi pada sektor maritim. Indikator PDB Maritim disusun berdasarkan prinsip neraca satelit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari neraca utama sebagai dasar penyusunan PDB.



Klaster PDB Maritim

12 Cluster PDB Kemaritiman		Jumlah KBLI berdasarkan Cluster	
dengan total 374 KBLI			
<ol style="list-style-type: none"> Perikanan dan Budidaya Maritim (Fishing/ Aquaculture); Sumber Daya Energi Maritim (Offshore oil and gas); Sumber Daya Mineral Maritim (Minerals); Industri Pengolahan Maritim (Marine Based Industry); Industri Pembuatan, Pemeliharaan dan Jasa Perbaikan Kapal (Boat and Ship Building, Maintenance and Repair); Industri kemaritiman Lainnya (Other Marine Industry); 	<ol style="list-style-type: none"> Energi Baru dan Terbarukan Maritim (Marine renewable energy and distribution); Konstruksi Maritim (Marine construction); Perdagangan Maritim (Marine Trade); Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim (Marine Transportation of Support Activities); Wisata Bahari (Marine Tourism & Recreation); Jasa Maritim (Marine Services); 	No.	Cluster
			Jumlah KBLI
		1	Perikanan dan Budidaya Maritim
		2	Sumber Daya Energi Maritim
		3	Sumber Daya Mineral Maritim
		4	Industri Pembuatan, Pemeliharaan dan Jasa Perbaikan Kapal
		5	Energi Baru dan Terbarukan Maritim
		6	Konstruksi Maritim
		7	Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim
		8	Wisata Bahari
		9	Jasa Maritim
		10	Industri Pengolahan Maritim
		11	Industri Kemaritiman Lainnya
		12	Perdagangan Maritim
		Jumlah	
			374

Sumber: KBLI Kemaritiman, 2021

PDB Kemaritiman periode didasarkan pada *framework Ocean Accounts* tahun 2019 dimana tersusun 12 cluster dengan total cakupan 374 KBLI, dengan menggunakan *framework* yang sudah terstandarisasi secara internasional.

Target

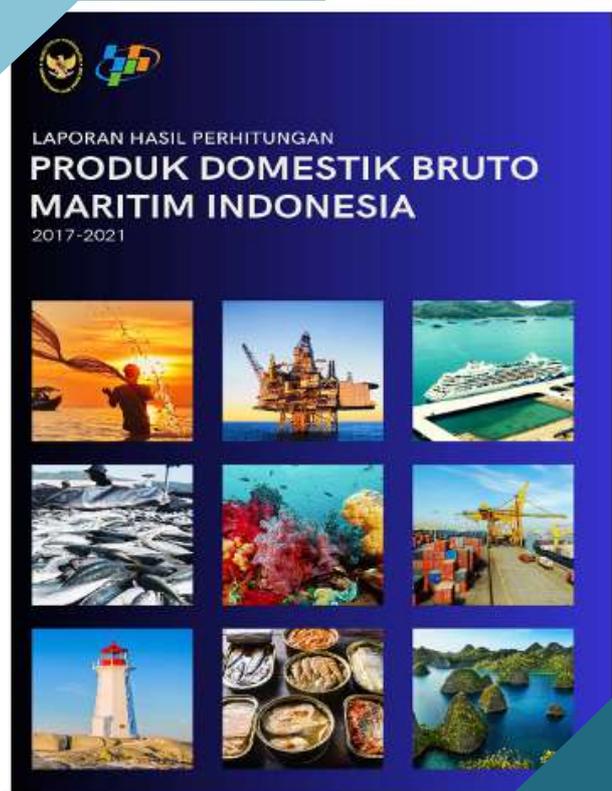
7,7%

Realisasi

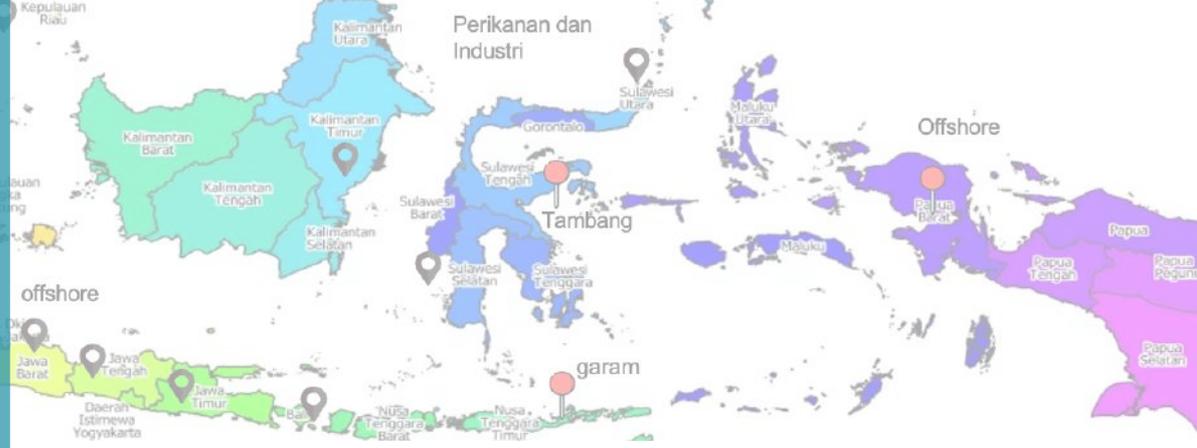
7,92%

Capaian

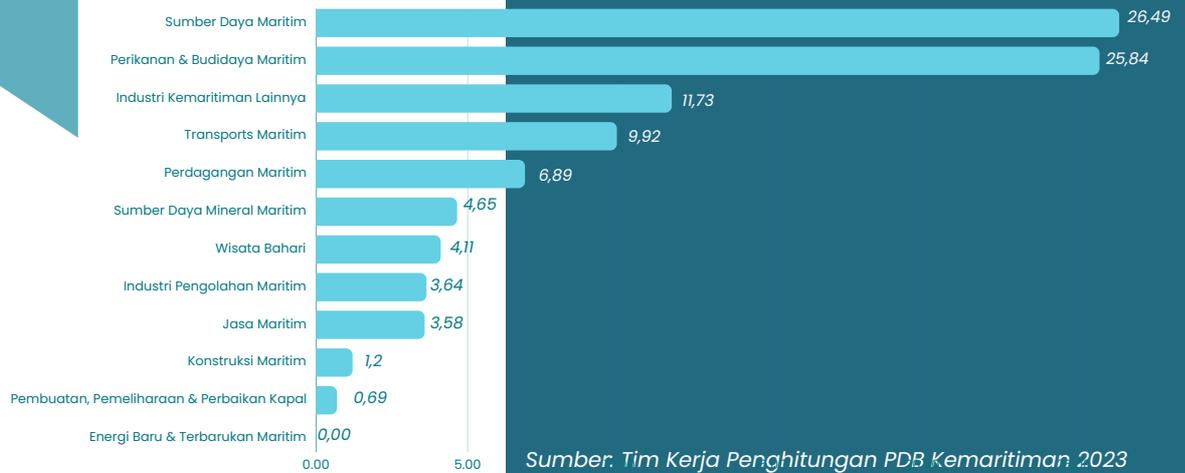
102,86%



IKU Kontribusi PDB Maritim Terhadap PDB Nasional

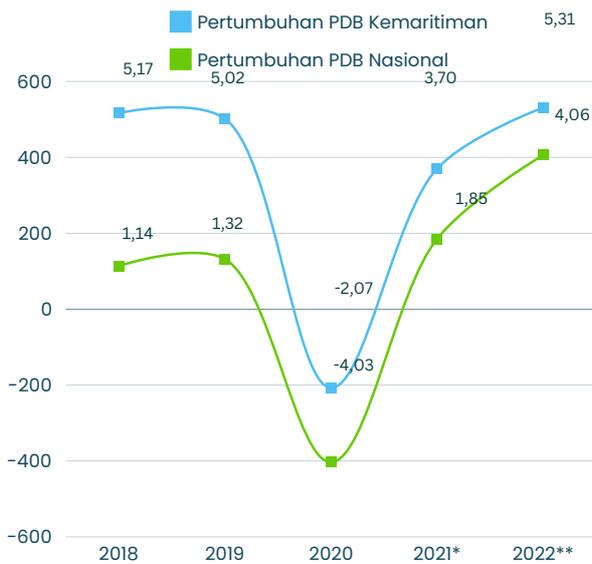


Kontribusi masing-masing Kluster Penunjang Penghitungan PDB Kemaritiman Tahun 2022



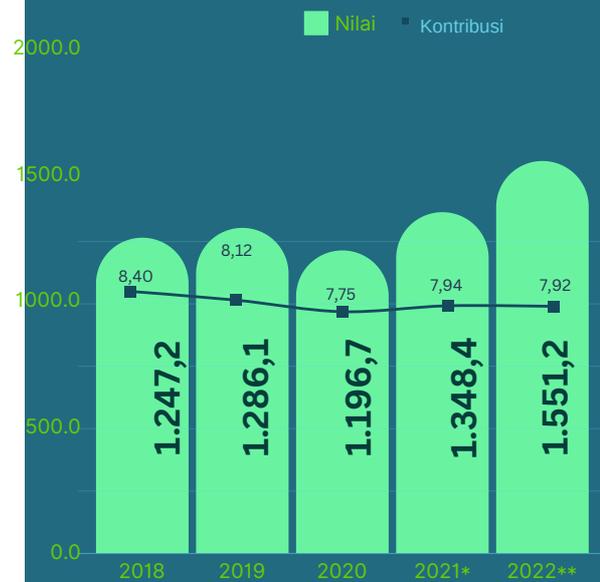
Sumber: Tim Kerja Penghitungan PDB Kemaritiman 2023

Share PDB Kemaritiman Terhadap PDB Nasional Tahun 2022



*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Kontribusi PDB Kemaritiman 2017 - 2022



*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Nilai PDB Kemaritiman (Tribun Rp) & Kontribusi PDB Kemaritiman (%) Tahun 2018-2022 sebesar 7,92%. Hal ini membuktikan bahwa Pertumbuhan PDB Kemaritiman mengikuti tren pertumbuhan PDB Nasional.

Capaian

IKU Indeks Kepemimpinan Maritim

3 aspek yang menjadi Formula Indeks Kepemimpinan Maritim :

- **Aspek Indeks Kedaulatan Maritim**
- **Aspek Indeks Diplomasi Maritim**
- **Aspek Indeks Ekonomi dan Sumber Daya Maritim**

Target



Realisasi



Capaian

100%

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020-2023

	2020	3
	2021	3
	2022	4
	2023	3



Kegiatan Pendukung capaian IKU:

1. AIS Forum 2023;
2. Koordinasi Penguatan Keamanan dan Pengawasan Maritim Indonesia;
3. Koordinasi Penetapan Perairan Pedalaman dan Revisiting Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
4. Koordinasi Persiapan Adopsi ILBI BBNJ
5. Koordinasi Pembahasan Rancangan Concept Paper Indonesia-Australia Maritime Dialogue (IAMD).
6. Koordinasi Pembahasan Posisi Pemri Terhadap Proposal EU-CRIMARIO;
7. Meeting, Ministerial Meeting, dan Emerging Economies Cooperation Summit Tahun 2023;
8. The 1st IORIS Steering Committee Meeting;
9. dll.

SS 2: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif Dan Efisien

Sasaran yang ingin dicapai dari SS ini yaitu terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Efisien, yaitu apabila seluruh kebijakan bidang kemaritiman & investasi yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh K/L.

SS 2 memiliki 2 IKU yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti dan IKU Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan.

3 IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

IKU ini menggambarkan persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, yaitu tingkat pelaksanaan gagasan/saran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap K/L tentang suatu isu dibidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Sumber Daya Maritim, Infrastruktur dan Transportasi, Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Investasi dan Pertambangan guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan.



IMMEDIATE OUTCOME

memiliki bobot sebesar 0,2% dari target capaian total, yang terdiri dari 1 SS dan 2 IKU. SS tersebut yaitu:

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif Dan Efisien



6 Rekomendasi Kebijakan

Terdapat 6 rekomendasi dari IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti kebijakan yakni:

1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025
2. Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)
3. Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia
4. Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang
5. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di DPSP
6. Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif



Capaian
IKU 3 Tahun 2023

Target
100%

Realisasi
100%

Capaian
100%



Penjelasan

Rekomendasi Kebijakan



Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, perlu disusun Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sebagai pedoman umum kebijakan kelautan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan K/L di bidang kelautan. Pelaksanaan KKI dijabarkan melalui dokumen Rencana Aksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.



Rancangan Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Besarnya peran wilayah perairan bagi sebuah negara kepulauan telah membuat Indonesia menginisiasi dibentuknya kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan. Hal ini dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada 2016 menggandeng Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Deklarasi Bersama Manado (*Manado Joint Declaration*) dan diikuti oleh 22 negara. Archipelagic and Island States (AIS) Forum adalah bagian dari deklarasi tersebut.

Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia

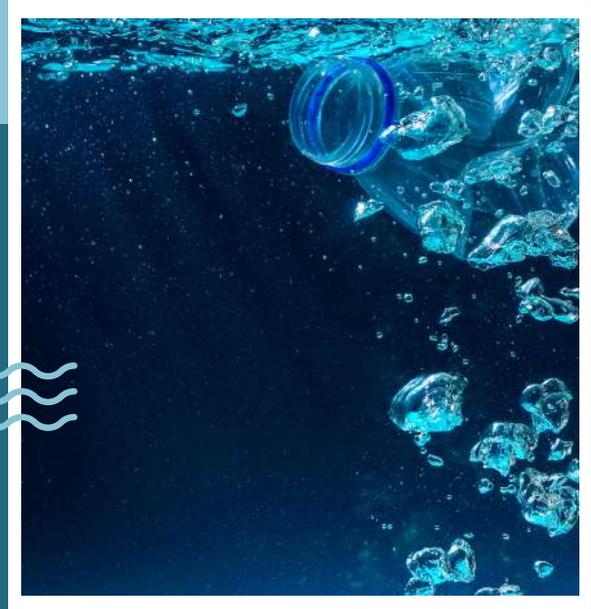
Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) disusun dalam rangka menjalankan amanat pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia serta melakukan pengelolaan secara berkelanjutan guna mendukung agenda pembangunan 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

IKLI memiliki fungsi strategis dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, di tingkat nasional maupun daerah.

IKLI sebagai alat ukur kesehatan laut Indonesia yang mengadopsi kerangka Ocean Health Index (OHI).

10 tujuan atau target utama IKLI merupakan hasil adopsi dari OHI.

Kemeko Marves menginisiasi dan mengoordinasikan *stakeholders* untuk menyusun IKLI.

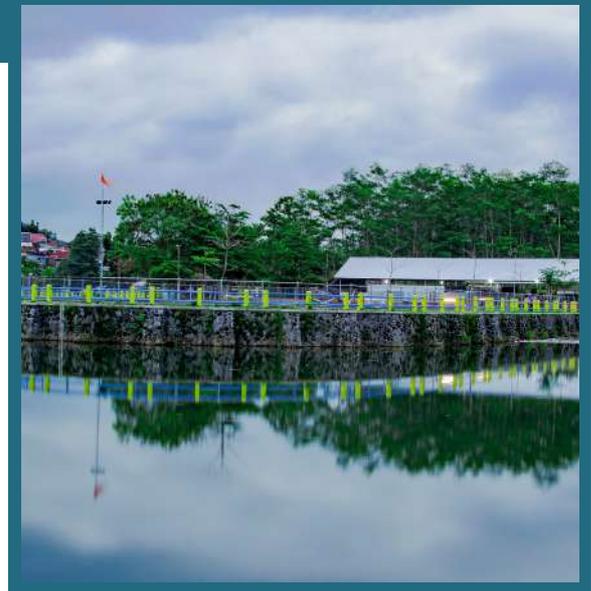


Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Udang merupakan salah satu komoditas primadona sektor perikanan dengan nilai ekspor paling tinggi diantara komoditas perikanan lainnya seperti ikan tuna dan cakalang.

Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan dokumen RPJMN adalah peningkatan produksi ikan menjadi 20.4 juta ton pada tahun 2024, peningkatan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8.2 Miliar.

Pemerintah telah menargetkan produksi udang nasional mencapai peningkatan 250% persen atau sebesar 2 juta ton di tahun 2024 dan nilai ekspor udang sebesar USD 4.3 Miliar.



Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di DPSP

Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang

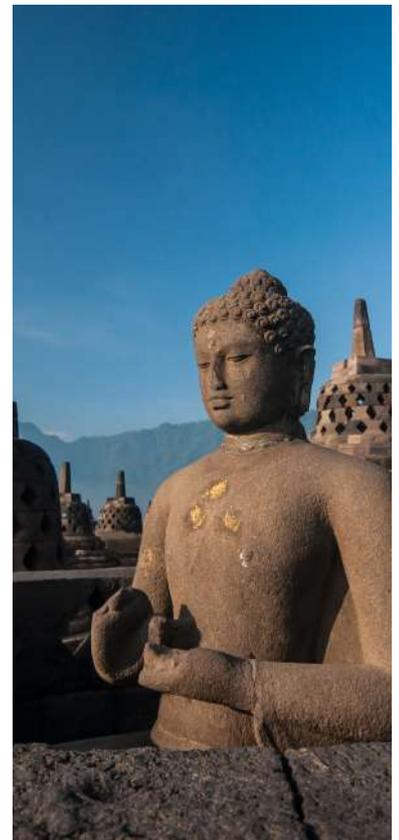


Pemerintah ingin mewujudkan 10 Bali Baru melalui program pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yang merupakan salah satu . 10 DPP tersebut merupakan Major Project sebagai salah satu agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Fokus pembangunan pariwisata di lima tahun berjalan, ditetapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Lima DPSP tersebut merupakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas 15 September 2019.

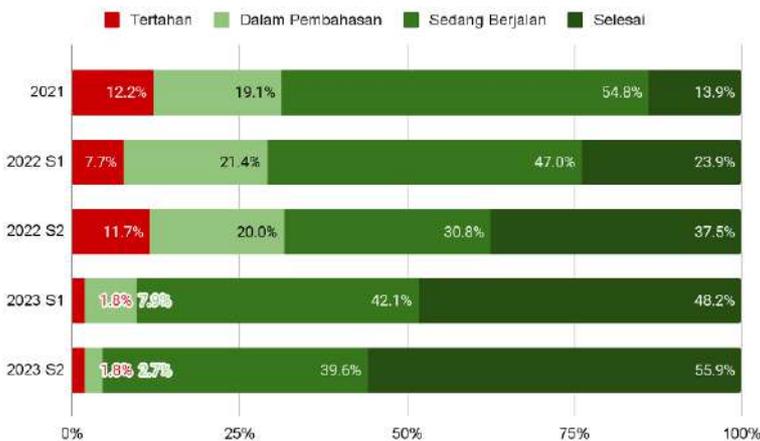


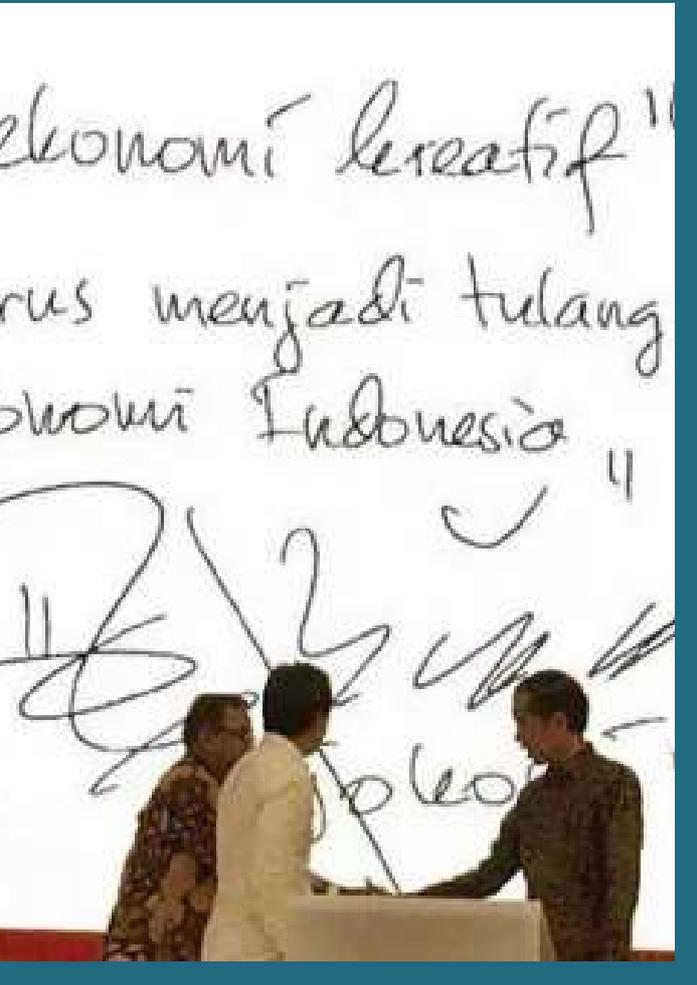
Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan lima DPSP sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan penanganan isu-isu pengembangan lima DPSP dimaksud.

isu yang telah selesai meningkat dari 23% menjadi 35%. Perbaikan aspek daya saing dasar perlu dilanjutkan sebagai prioritas. Dari 101 isu di 5 DPSP, 98,2% sudah dalam status 'selesai', 'dalam pembahasan' dan 'sedang berjalan'. Adapun 1,8% atau 4 isu masih dalam status 'tertahan'.



Perkembangan Pembangunan 5 DPSP Tahun 2023





Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sekitar 5,76%.

Menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan, diperlukan penguatan kemampuan industri kreatif untuk bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif impor. Keterkaitan dengan sektor-sektor lain perlu diperkuat. Berbagai inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelaku industri kreatif tentu memerlukan wadah untuk mengekspresi karyanya.

Kemenko Marves sebagai kementerian koordinator yang salahsatu tugasnya dalam bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, terus mendorong pencapaian target kinerja dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, melalui berbagai kebijakan strategi.

Target Tahun 2023

- Wisatawan mancanegara yang datang 8,5 juta orang,
- Wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan.
- Nilai devisa pariwisata tahun ini ditargetkan mencapai US\$7,08 miliar – US\$9,99 miliar.
- Ekspor ekonomi kreatif bisa mencapai US\$26,46 miliar
- Target sektor parekraf bisa membuka lapangan kerja bagi 45 juta orang.
- Nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan bisa menyentuh level Rp1.279 triliun.



4 IKU Persentase Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan

IKU ini menunjukkan apabila jumlah isu strategis (major project/janji presiden/PSN) di bidang kemaritiman dan investasi yang dapat diselesaikan sesuai target.

16 Isu-isu strategis yang diselesaikan

- Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional
- Koordinasi Pelaksanaan Blue Halo S
- Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan dan Jembatan
- Proyek Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Ibu Kota Nusantara
- Janji Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia-BBI
- Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung
- Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung
- Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanah Kuning
- Major Project Kereta Cepat Jakarta – Bandung
- Major Project Pembangunan Smelter
- Janji Presiden Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai
- Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara
- Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX
- Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit
- Persentase Dukungan Kebijakan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Unconditionaltercapai
- Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.





Capaian

IKU 4 Tahun 2023

Target
100%

Realisasi
100%

Capaian
100%





Penjelasan Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional

Mendorong pencapaian kecukupan penyediaan energi, minyak, dan gas bumi yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan Indonesia di masa depan mengingat potensinya yang masih cukup besar. Dasar pelaksanaan dari koordinasi rancangan desain besar pemanfaatan Gas Nasional adalah UU No 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan PerPres No.109/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



Tindak Lanjut

- Mendekarbonisasi ketenagalistrikan dengan mengurangi ketergantungan batu bara melalui pengembangan transmisi dan energi terbarukan (ET)
- Mendorong penggunaan bahan bakar alternatif memiliki potensi yang besar untuk dekarbonisasi sektor industri.





MPAs & Blue-Halo-s in PP-714, 715, and 718

Koordinasi Pelaksanaan Blue Halo S

Konsep Blue Halo S didefinisikan sebagai integrasi manajemen kawasan konservasi perairan (Blue) yang memberikan dampak terhadap fishing ground di sekitarnya (Halo) sehingga menimbulkan dampak yang berkelanjutan (S/Sustainable) baik terhadap ekologi bawah air, maupun aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Hasil dari usaha penangkapan ikan hingga saat ini dinilai belum memberikan sumbangsih yang cukup kepada lingkungan dan masyarakat nelayan artisanal, sehingga konsep ini sangat perlu untuk diterapkan.

Blue Halo Sustainability (Blue Halo S) yang tujuannya mencakup 3 hal yaitu, protection, production, sustainable financing.



Target dan Capaian Pengelolaan Kawasan Konservasi



Peta Lokasi WPP 572 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung dan Banten)

Mitra NGO yang memiliki spesialisasi di bidang konservasi dan restorasi, pengelolaan perikanan tangkap, pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan berkelanjutan terdiri dari: YKCI (Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia); YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara); WRI (World Resource Institute); KEHATI; EDF (Environmental Defense Fund); DFW (Destructive Fishing Watch); dan RARE.

Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan dan Jembatan

Dasar pelaksanaan monitoring progress Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Jalan dan Jembatan yakni PerPres No.109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PerPres No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Permenko Perekonomian No.21/2022 tentang Perubahan atas Permen Perekonomian No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIPP) berdasarkan Perpres 122 Tahun 2016 yang bertugas untuk yang bertugas untuk memastikan target pembangunan infrastruktur selesai secara cepat.

53 PSN Sektor Jalan dan Jembatan yang menjadi fokus penyelesaian pembangunannya sampai dengan tahun 2024. Beberapa kriteria yang menjadi penilaian untuk status keberlanjutan proyek-proyek agar tetap masuk dalam daftar PSN yaitu (a). financial close; (b). Syarat dan ketentuan berlaku sudah selesai; dan (c). Jaminan status tanah sudah clear and clean.

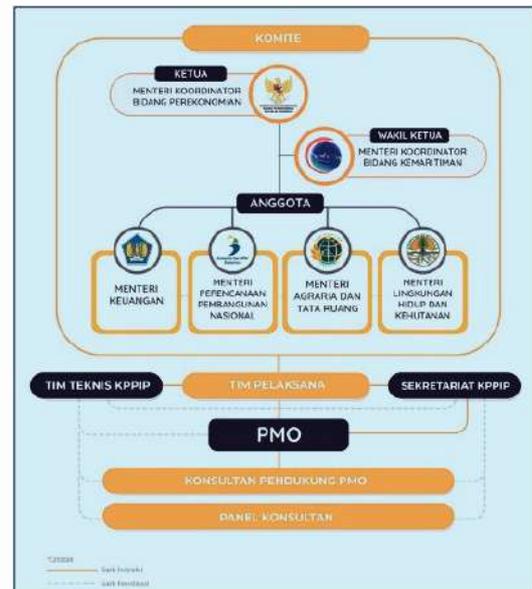
Ruas Jalan Tol dan Jembatan

- Jalan Tol Semanan – Sunter dan Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta
- Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/NPEA
- Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu
- Jalan Tol Serpong – Balaraja
- Jalan Tol Bogor Ring Road (Termasuk Caringin – Salabenda)



17,864
km total jalan tol

Indonesia memiliki rencana rinci pembangunan total 18 ribu km jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Indonesia pada tahun 2050



Struktur Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIPP)

Sumber: KPIPP

- Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar
- Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap
- Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi
- Jalan Tol Depok – Antasari (Termasuk Bojonggede – Salabenda)
- Pembangunan Akses Pelabuhan Patimban
- Jalan Tol Semarang – Demak
- Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
- Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo
- Jalan Tol Kertosono – Kediri (Tambahkan Lingkup Jalan Tol Ngawi – Kertosono)
- Jalan Tol Kediri – Tulungagung
- (Jalan Tol Akses Bandara Doho di Kediri)
- Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo
- Jalan Tol Serang – Panimbang
- Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan
- Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan
- Jalan Tol Cimanggis – Cibitung
- Jalan Tol Cibitung – Cilincing
- Jalan Tol Cinere – Jagorawi
- Jalan Tol Ciawi – Sukabumi

Proyek Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Ibu Kota Nusantara



Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya mendorong pemerataan wilayah agar mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan Luar Wilayah Jawa.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022. UU IKN mengatur ketentuan mengenai cakupan wilayah dan fungsi dari IKN. Pengembangan Wilayah IKN terbagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Perencanaan (WP), yakni Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN), Kawasan IKN (KIKN), dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).



Pengembangan ketiga WP tersebut akan dilakukan melalui 5 (lima) tahapan pembangunan yang secara keseluruhan dimulai pada pertengahan tahun 2022 dan akan selesai pada tahun 2045. Saat ini, pembangunan IKN berada pada tahap pertama (2020-2024) yakni tahap pemindahan awal ke Kawasan IKN yang secara aspek infrastruktur dan lingkungan



Janji Presiden Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai



Pemerintah terus mendorong akselerasi pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Tanah Air. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program bantuan pembelian electric vehicle (EV) yang basis produksinya dilakukan di dalam negeri.

Kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023, berdasarkan Peraturan Presiden No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kemenko Marves berkomitmen untuk mendukung pengembangan KBLBB di Indonesia. hal tersebut terus dilakukan dengan mengkoordinasikan bersama K/L teknis guna mensukseskan pengembangan KBLBB ini.

Indonesia merupakan salah satu pasar dan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara



Pemerintah mendorong adopsi dan investasi industri melalui berbagai insentif

Insentif untuk adopsi KBLBB

- IDR 7 Jt untuk pembelian baru
- IDR 10 Jt untuk konversi
- PPN: dari 11% menjadi 1%
- PPnBM 0%
- Bebas ganji genap



Program investasi untuk industri KBLBB

- Relaksasi kuota impor dan bea masuk CBU
- PPH 22 dengan tarif terendah
- Penyesuaian target TKDN
- Berlaku untuk produsen yang berkomitmen melakukan produksi domestik

1. Targeting 30% new sales share, for 2W: projected total sales 6.4 Mn unit at price USD 1,000-1,300; 4W: projected total sales 2 Mn unit at price USD 20-30 thousand
Sources: [Kemenperin](#), [AISI](#), [LPEM UI](#)



Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara



Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pada tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk mendiskusikan persoalan Sofifi sebagai Ibu kota Maluku Utara yang sudah tertunda selama 22 tahun.

Pembangunan Kota Baru Sofifi telah menjadi salah satu agenda prioritas nasional sejak RPJMN 2015–2019 dan 2020–2024 (Major Project), dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk “Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

Saat ini sudah ada sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sarana jaringan air bersih serta perumahan baik tapak maupun vertikal yang dibangun K/L teknis secara bertahap. Harapannya agar seluruh pihak baik pemerintah daerah serta instansi vertikal dan masyarakat bisa ikut mensukseskan pemindahan Ibu Kota Maluku Utara.

Rencana Pembangunan Ibukota Sofifi yang Dilakukan oleh K/L Tahun 2023

K/L		Kegiatan Tahun 2023	Indikasi Kebutuhan
POLRI	(1)	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Polda	Rp 183.191.400.000
	(2)	Rehabilitasi Dermaga Polisi Air	Rp 53.000.000.000
Kementerian ATR/BPN	(3)	Perluasan/Penambahan Gedung Kantor, Kanwil BPN Prov. Malut	Rp 11.580.000.000
Kementerian Perhubungan	(4)	Lanjutan Pembangunan Kantor BPTD Maluku Utara	Rp 15.000.000.000
	(5)	Pembangunan Dermaga Sandar Pelabuhan Sofifi	Rp 80.000.000.000
Kementerian PUPR	(6)	Pembangunan Perumahan TNI AD	Rp 76.000.000.000
	(7)	Pembangunan Perumahan POLDA	Rp 294.722.000.000
	(8)	Pembangunan Rumah Dinas dan Mess Pegawai, Kanwil BPN Prov. Malut	Rp 32.100.000.000
	(9)	Pembangunan Rusunawa ASN	Rp 29.965.000.000
	(10)	Pembangunan Rusunawa Nakes RSUD dan RSJ	Rp 29.965.000.000
	(11)	Desain Rehabilitasi Embung Sofifi	Rp 2.000.000.000
Total			Rp 807.523.400.000

Sumber: Kemenko Marves, 2021



Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan OceanX



Kemenko Marves menggandeng Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) serta melaksanakan koordinasi dengan stakeholder guna pelaksanaan riset maritim OceanX Expedition di perairan Indonesiaini melalui kerja sama Penelitian Riset Kelautan OceanX.

Kerja sama ini sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan juga bagi masyarakat global. seluruh pemangku kepentingan nasional telah menyatakan dukungannya terhadap ekspedisi ini.

Kemenko Marves akan selalu memberikan dukungan sumber daya, kompetensi, jaringan dan segala bentuk bantuan yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian maritim ini. Kolaborasi penelitian maritim tidak hanya untuk keselamatan navigasi, namun juga untuk mengembangkan pengetahuan kelautan, dan mendukung ekonomi biru.

Upaya yang dilakukan yakni:

- Survey kapal serta pelaksanaan workshop bagi peneliti Indonesia yang ada disekitar rotherdam serta pembekalan bagi personal yang akan onboard di kapal OceanXplorer (2 kelas paralel).
- Melakukan pelatihan berbasis pemetaan kawasan pesisir menggunakan data remote sensing
- Kemenko Marves melakukan finalisasi MOU tingkat Pemerintah Indonesia bersama Pihak OCEANX sebagai persiapan pelaksanaan MOU serta kegiatan workshop/survey di Rotterdam.





Tim Satgas SIPEREMBUN

Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit

Diterbitkannya Keppres 9/2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara merupakan upaya tindak lanjut dari pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 melalui direktif Presiden kepada Kemenko Marves untuk penanganan terkait audit Sawit, pembentukan.

Tim Satuan Tugas untuk menangani tata kelola industri kelapa sawit, serta melakukan penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak pada industri kelapa sawit.

Satgas bekerja mulai 14 April 2023 sampai 30 September 2024. Dampak yang dirasakan apabila program ini berjalan:

- pemulihan hak negara yang berasal dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (+/- 4-30 Triliun);
- peningkatan tata kelola industri sawit / rencana zonasi

Inovasi untuk memantau dan mengawasi perkembangan lahan sawit di Indonesia, mengimplementasikan sistem pelaporan mandiri (selfreporting) melalui Sistem Pemantauan Perkebunan Berkelanjutan (SIPERIBUN).

Program ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk secara aktif melaporkan serta memperbarui informasi terkait lahan sawit yang mereka kelola.

Program ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk secara aktif melaporkan serta memperbarui informasi terkait lahan sawit yang mereka kelola.

Tahun 2023 pelaksanaan program, sebanyak 647 perusahaan telah teridentifikasi masuk dalam SK Datin. Jumlah perusahaan terdaftar di SIPERIBUN pasca Self Reporting meningkat signifikan.



Jumlah Perusahaan terdaftar pada SIPEREMBUN Tahun 2023



Potensi Penyelesaian 110A: Rp4,8 Triliun



Rencana tindak lanjut tahun 2024

- Digitalisasi untuk mempercepat penyelesaian lahan sawit dalam kawasan hutan, yang akan menambah penerimaan keuangan negara dari sektor PNPB sektor penerimaan sumber daya alam.

Persentase Dukungan Kebijakan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Unconditional

Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020.

Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030.

Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO₂e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO₂e pada target conditional (CM2).

Sebagai kontrol terhadap progress capaian NDC, serta sebagai pelaksanaan PerPres. No.71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK), Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan inventarisasi GRK Nasional, serta Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), dengan mengacu pada Intergovernmental Panel on Climate Chang.



Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat penyimpanan karbon, Berdasarkan kinerja implementasi nilai ekonomi karbon saat ini potensi kredit karbon Indonesia sebesar 1 gigaton CO₂ ekuivalen senilai Rp3.000 triliun, perlu diperdagangkan dengan standar internasional. Dari Sektor FOLU (Non-Pasar) bahwa result based payment pada beberapa proyek REDD+, yaitu: Carbon Fund di Kalimantan Timur, proyek di Jambi dan Pemerintah Norwegia dengan total nilai sekitar USD 236 juta





Peluang yang ada terkait perdagangan karbon luar negeri yaitu:

- Kerjasama perdagangan karbon tiga negara Indonesia-Brazil-Congo (IBC).
- Pelaku perdagangan karbon tidak dapat melakukan perdagangan luar negeri seperti sebelumnya, dimana VCM telah berkontribusi membantu investasi pada 150 proyek Energi Terbarukan di Indonesia hingga tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan guna mendukung pencapaian target pada tahun 2023, antara lain:

- Pengembangan teknologi garis pantai berdasarkan ilmu Karbon Biru untuk adaptasi perubahan iklim dari MOF.
- Program rehabilitasi mangrove, mampu menyerap karbon.
- Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Nasional diantaranya ada bidang karbon biru dalam pokja

Rencana tindak lanjut untuk NDC Indonesia:

- Coal phase down dengan kerangka energi transisi
- Komitmen baru dalam adaptasi terkait dengan lautan, lahan basah, pemukiman manusia
- Sumber daya blue carbon
- Pengurangan HCF

- Dokumen Perencanaan yang terintegrasi
- Melibatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan stakeholders
- Menjadi kebijakan nasional tunggal yang menjadi rujukan bagi berbadai program
- Sistem pemantauan terpadu
- Memiliki kerangka kebijakan yang fleksibel yang akan memungkinkan inovasi
- Fokus pada pengembangan kapasitas disemua tingkatan

Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ditetapkan berdasarkan PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Ripparnas).

Dari 88 KSPN di dalam peraturan tersebut, 10 di antaranya merupakan KSPN prioritas yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

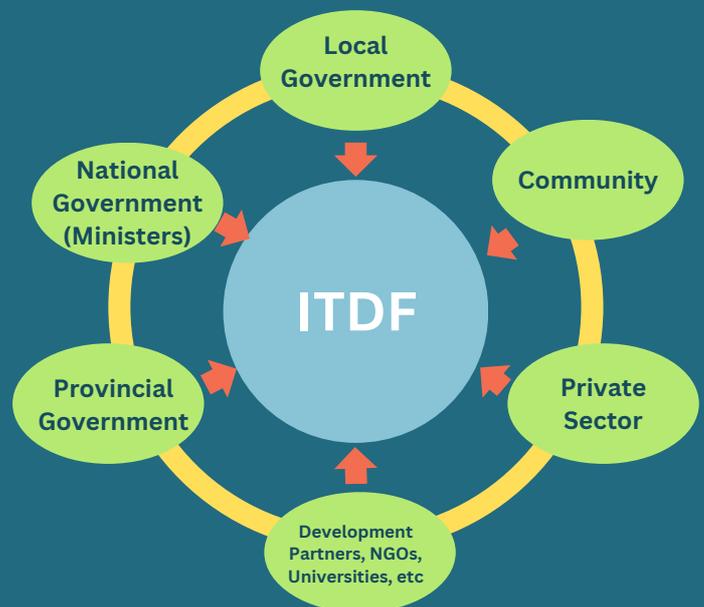
Meskipun Raja Ampat tidak termasuk dari 10 KSPN Prioritas.

10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah, yakni:

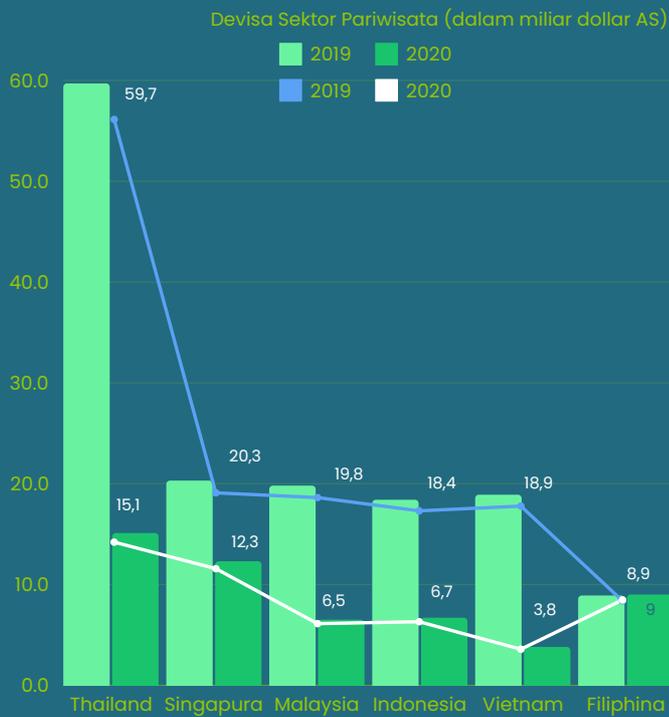
- Danau Toba (Sumatera Utara);
- Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur);
- Borobudur (Jawa Tengah);
- Wakatobi (Sulawesi Tenggara);
- Lombok (Nusa Tenggara Barat);
- Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung);
- Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur);
- Morotai (Maluku Utara);
- Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara);
- Raja Ampat (Papua Barat).

Dari 10 KSPN Prioritas, Pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Rencana Induk Pariwisata Terpadu



sumber: bpiw.pi.go.id (diolah)



Sumber: BPS, ASEAN Tourism Statistic, UNWTO Report, diolah



Sumber: WEF

Infrastruktur KSPN yang dibangun mencakup konektivitas (penanganan jalan dan jembatan), bidang sumber daya air (pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir), bidang permukiman (penataan kawasan, persampahan, dan sanitasi), dan bidang perumahan (pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata).

Telah dilakukan pembangunan: pelebaran alur Tano Ponggol di Kabupaten Samosir Sumatera Utara, penyediaan home stay sebagai sarana pendukung KSPN di Desa Wanurejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dan penataan sepanjang Pantai Marina-Bukit Pramuka Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.

Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat dari pembangunan pariwisata, dan mendorong investasi swasta di Destinasi Prioritas Nasional.



Janji Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia-BBI



Guna percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres No. 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Capaian Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan program BBI:

- Nilai realisasi belanja dari K/L, Pemda dan BUMN mencapai Rp 762,7 Triliun.
- Jumlah produk tayang di e-katalog mencapai 2,49 juta produk, melebihi target 1 juta.
- Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik.
- Integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan, antara sistem di Kemendagri, Kemenkeu, dan LKPP.
- Implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun.
- Komitmen belanja tahun 2023 sebesar Rp 1.303 triliun, meningkat 50% dari tahun 2022 yang sebesar Rp 866 triliun. Peningkatan komitmen terbesar bersumber dari BUMN dan K/L.
- Tingkat realisasi belanja meningkat 67%, ditopang oleh BUMN dan Pemda.



- Melakukan koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan ekosistem untuk percepatan peningkatan penggunaan PDN, produk UKM dan koperasi untuk menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Melakukan koordinasi dalam penyusunan roadmap strategi peningkatan penggunaan PDN, UKM, dan koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah PDN menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
- Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pengalokasian, dan realisasi paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UKM, dan koperasi dari hasil PDN



- Melakukan koordinasi dalam pencapaian target belanja APBN dan APBD paling sedikit Rp400 triliun untuk PDN dengan prioritas produk UKM dan koperasi.
- Melakukan koordinasi guna pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
- Reward and punishment tambahan bagi K/L/Pemda yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog dan belanja sebesar Rp 500 Triliun dari e-Katalog.

Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung

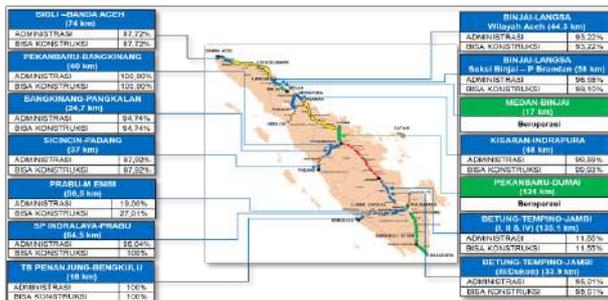
Melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015, Pemerintah membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans- Sumatera.

Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang kurang lebih 2.828 km digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional di regional Sumatera.



Capaian dari progres percepatan investasi tol Sumatera Tahun 2023



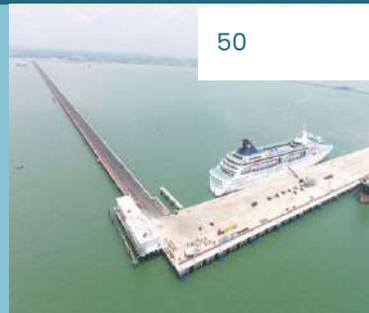
Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

Sesuai rencana awal, Pelabuhan Kuala Tanjung akan diintegrasikan dengan kawasan industri dan telah diatur sesuai Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Perpres No. 56 tahun 2018, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung dan Kawasan Industri Kuala Tanjung merupakan 2 (dua) Proyek Strategis Nasional, dan akan dikembangkan secara terintegrasi sesuai hasil studi yang telah dilakukan.

Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah ditetapkan dengan Kepmenhub No KP 148 tahun 2016 tersebut akan menjadi acuan pembangunan, pengembangan dan operasional pelabuhan pada jangka pendek (2017-2021), jangka menengah (2017-2026) dan jangka panjang (2017-2036).

Pelabuhan ini ditargetkan menjadi hub bongkar muat barang untuk pasar domestik kapal-kapal ber-tonase besar, yang selama ini selalu bersandar di Pelabuhan Klang, Malaysia dan Singapura, serta.

Fungsi utama Pelabuhan Kuala Tanjung adalah sebagai pelabuhan transshipment sebagaimana Pelabuhan Singapura dan untuk mendukung Kuala Tanjung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).



50



Tindak lanjut

- Akan dilakukan finalisasi struktur untuk Kawasan Industri seperti yang sudah di diskusikan sebelumnya, untuk kemudian struktur final akan dikirimkan kepada pihak Zhejiang dan PoR.
- Untuk memperkuat positioning Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Hub International.
- Direncanakan pembangunan industrial port untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung seperti steel, petrochemical, fertilizer, CPO/agro-businesses, dan lain sebagainya.
- Akan ada kolaborasi Pelabuhan Belawan yang akan menjadi Konsolidator Kontainer di Hinterland Sumatera Bagian Utara (Medan, Aceh, Tapanuli Utara), sedangkan Kuala Tanjung akan menjadi Logistic dan Supply Chain Hub di Indonesia

Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanah Kuning



Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ditetapkan bahwa Kawasan Industri Tanah Kuning termasuk dalam bagian Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Saat ini terdapat 4 (empat) pengelola PSN Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning yang telah ditetapkan didalam surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Kayan Patria Propertindo (KPP), PT Indonesia Strategis Industri (ISI), dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI). Empat pengelola tersebut.



Berdasarkan penetapan tersebut, akan dilakukan evaluasi secara berkala terkait progres perizinan dan pembangunan oleh masing-masing pengelola, bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Nilai investasi (capital expenditure) di dalam proyek PSN tersebut diperkirakan mencapai sebesar 132 Miliar USD hingga tahun 2029, sementara penerimaan (revenue) di masa mendatang diperkirakan mencapai 113 Miliar USD per tahun.

Arahan penting Presiden Republik Indonesia saat groundbreaking PSN KI Tanah Kuning pada tanggal 21 Desember 2021 adalah bahwa PSN tersebut diproyeksikan menjadi Kawasan Industri Hijau terbesar di dunia, dengan target awal mencapai luas 16.400 Ha hingga 30.000 Ha. Investasi hijau di Kalimantan Utara menemui banyak tantangan karena memerlukan banyak stakeholder untuk maju bersama. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus pada *debottlenecking* isu PLTA dan Kawasan Industri, dalam hal ini berperan aktif dalam penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha dan berinvestasi.

Inovasi & Succes Story

- Untuk pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah Percepatan proses Tukar Menukar Aset antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Kawasan Industri serta Penyempurnaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) sebagai salah satu enabler investasi hijau.
- Nilai Capital Expenditure investasi tenant Petrokimia mencapai USD56 Miliar;
- Nilai Capital Expenditure investasi tenant Electronic Alumina mencapai USD8 Miliar (data tahun 2022).
- Beasiswa bagi 80 siswa peserta program beasiswa Vokasi Mandarin.

SDM yang mendapat beasiswa vokasi tersebut tidak hanya sebagai pemandu bahasa, namun juga dapat berkontribusi, bekerja sebagai di leader, baik di manajemen menengah, maupun atas.



Major Project Kereta Cepat Jakarta – Bandung



Key Milestones Menuju COD Juni 2023

KCJB merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 93/2021 yang untuk menggantikan Perpres No 107/2015 tentang percepatan penyelenggara an prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Penyediaan PSN KCJB berasal dari penerbitan obligasi, pinjaman konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan patungan, kerja sama dengan China, serta pendanaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peresmian KCJB oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara, dengan kecepatan 350 kilometer per jam. Dan, kereta cepat ini kita namakan Whoosh, W-H-O-O-S-H, dibaca 'wus'. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini, dan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi bacanya 'wus'.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD (transit oriented development). Dan, proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita.

Jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh tembus 18.000 orang dalam sehari pada 4/11/2023.. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi sejak Kereta Cepat Whoosh dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023. Secara rinci, volume penumpang Kereta Cepat Whoosh mencapai 18.053 penumpang dengan tingkat okupansi sekitar 94% sampai 100%. Jumlah tersebut meningkat 33% dibanding sepekan sebelumnya, yakni 13.490 penumpang pada 28 Oktober 2023.



Capaian tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves:

- Fasilitasi peresmian tersambungannya seluruh jalur KCJB oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan di Stasiun KCJB Halim. Terdapat total sebanyak 304 km rel yang telah terpasang meliputi jalur ganda seluruh trase KCJB sejauh 142,3 km, rel di 4 stasiun KCJB, dan Depo Tegalluar.
- Pengendalian dan pemantauan proses peletakan rel atau track laying memakan waktu 12 bulan sejak dimulai pada 20 April 2022. Pekerjaan dilakukan menggunakan mesin track laying yang pertama kali ada di Indonesia. Mesin ini mampu memasang rel hingga sepanjang 5 km per hari, lebih cepat jika dibandingkan dengan pemasangan rel secara manual.
- Pengendalian percepatan pembangunan konstruksi. Progres konstruksi KCJB saat itu telah mencapai 86% sesuai hasil verifikasi para konsultan. Pembangunan stasiun yang sebagian besar sudah di atas 90% akan terus disebut menjelang operasional KCJB.
- Fasilitasi koordinasi dalam upaya peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi dengan Pemrov DKI Jakarta, Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, maupun pihak swasta.
- Monitoring atau pengawasan track slab dan track laying Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
- Fasilitasi dukungan keterlibatan mahasiswa ITB dalam proyek pemasangan track slab dan track laying.
- Fasilitasi Penandatanganan MoU jelang persiapan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung. MoU tersebut dilakukan untuk berbagai aspek layanan KCJB mulai dari penjualan tiket, sistem pembayaran, pengembangan kawasan dan aksesibilitas, integrasi moda transportasi, serta penerapan energi terbarukan.
- Penyusunan SOP pengoprasian KCJB sesuai dengan PM 121/207 dan telah dilakukan diskusi teknis dengan tim Ditlalin DJKA (Direktorat Jenderal Kereta Api).

Major Project Pembangunan Smelter



Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun proyek-proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu diantaranya proyek pembangunan smelter merupakan salah satu proyek strategis nasional.

Data yang ada saat ini bahwa di dalam dokumen RPJMN terdapat 31 Smelter, dengan rincian: 16 smelter Nikel, 9 smelter Bauksit, 2 smelter Timbal & Seng, 3 smelter Besi serta 1 smelter tembaga. Tahun 2023 terdapat ada 11 smelter nikel (2 diantaranya terintegrasi tambang), 2 smelter tembaga, 2 smelter bauksit, dan 1 smelter besi dan vanadium.

Kebijakan hilirisasi mendorong industri pengolahan/pemurnian serta kawasan industri berbasis mineral terus berkembang di Indonesia. Melalui kebijakan hilirisasi telah tercapai: 1) Pertumbuhan investasi yang signifikan di industri pengolahan mineral (187 smelter), khususnya di industri nikel (111 smelter); 2) Tumbuhnya kawasan industri berbasis mineral di luar Jawa; 3) Perkembangan perekonomian Indonesia baik lokal maupun nasional.



Sebaran Jumlah Smelter

Kemenko Marves terus mendorong dan mendukung hilirisasi, terlepas dari penurunan harga komoditas ekspor hasil hilirisasi nikel masih tetap terjaga.

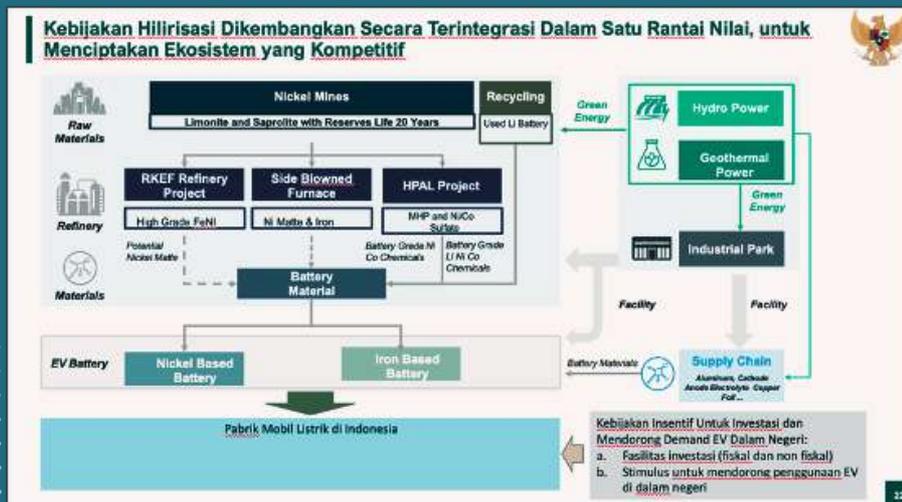
mendukung kebijakan hilirisasi yang dikembangkan secara terintegrasi dalam satu rantai nilai, untuk menciptakan ekosistem yang kompetitif. Kebijakan Insentif Untuk Investasi dan Mendorong Demand EV Dalam Negeri: Fasilitas investasi (fiskal dan non fiskal) dan Stimulus untuk mendorong penggunaan EV di dalam negeri.

Inovasi yang dilakukan yakni pemanfaatan sebagai aplikasi untuk Database Smelter melalui *Information and Communication System for Indonesian Mineral-Downstreaming Stakeholders (ICOS for IMDOS)*. Sejak Tahun 2021, Kemenko Marves telah melakukan pengumpulan data-data smelter se-Indonesia melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada perusahaan-perusahaan smelter, baik yang di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun Kementerian Perindustrian.

Pada akhir tahun 2022 sudah membuat database smelter menggunakan aplikasi/website yang sudah mencapai finalisasi (Information System) dan akan dilaksanakan tahap sosialisasi.

Manfaat dan kelebihan dari aplikasi ini adalah:

- Sinkronisasi data antara KESDM, Kemenperin, dan Kemeninv/BKPM.
- Validitas tinggi karena data yang terkumpul merupakan data primer.
- Kualitas perumusan bahan kebijakan meningkat karena didukung oleh data yang komprehensif.
- Data yang terkumpul dapat diguna-pakai oleh seluruh K/L.





ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (RB)



RB mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional



RB memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah

INTERMEDIATE OUTCOME

memiliki bobot sebesar 0,3 dari target capaian total, yang terdiri dari 1 SS dan 1 IKU. SS tersebut yaitu:

Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas,



SS 3: Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas

Maksud dari SS 3 yaitu terwujudnya suatu kondisi tercapainya target pembangunan kemaritiman melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. SS ini didukung oleh IKU Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

5 IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nilai yang digunakan dalam mengukur capaian Indikator ini adalah hasil evaluasi oleh KemenPANRB yang tercantum dalam lembar hasil evaluasi (LHE) atas pelaksanaan RB pada tahun berjalan (2023). Namun target tersebut tidak dapat di breakdown pertriwulan, karena angka resmi dari kontribusi Indeks RB hanya dirilis pada akhir tahun oleh KemenPAN RB

Capaian

IKU 5 Tahun 2023

Target

80

Realisasi

?

Capaian

?%

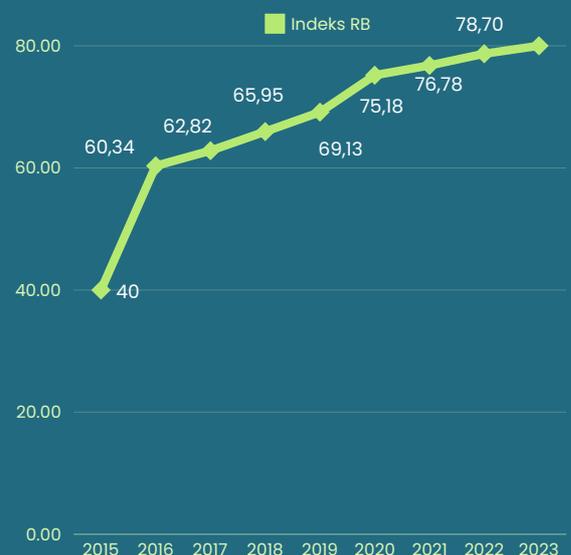


Upaya yang dilakukan Kemenko Marves

- Penguatan Agen Perubahan dan Budaya Kerja**
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menerima penghargaan dari Menteri PANRB sebagai Kementerian terbaik dengan kategori "The Best Starter" dalam menginternalisasikan cor values BerAKHLAK di tahun 2022, dengan capaian indeks BerAKHLAK tertinggi sebesar 64,4% (cukup sehat) berdasarkan hasil survei nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Tahun 2023 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali berhasil meraih terbaik nasional dengan memperoleh penghargaan The Biggest Improvement dan The Highest Score kategori Kementerian dalam acara Appreciation Day sebagai rangkaian dari ASN Culture Festival 2023
- Transformasi Reformasi Birokrasi Pusat dan Unit Kerja**
Strategi pencapaian RB di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode pertama sebagai kementerian baru dikategorikan baik dengan perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kenaikan indeks RB pada fase pertama Road Map RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2015-2019)
- Penguatan Agen Perubahan dan Budaya Kerja**
Dalam rangka penguatan agen perubahan serta mempertahankan predikat "Terbaik" dengan terus meningkatkan implementasi budaya kerja dan capaian indeks BerAKHLAK.
- Transformasi Reformasi Birokrasi Pusat dan Unit Kerja**
Rencana aksi RB tematik telah disusun oleh masing-masing unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rencana aksi tersebut telah dicermati bersama. Beberapa upaya tersebut antara lain sebagai berikut.dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diinput kedalam sistem E-RB untuk kemudian dilaksanakan input bukti dukung sesuai dengan timelineyang telah disepakati.



Indeks RB Kemenko Marves 2015 - 2023



Dukungan RB Tematik

5

Fokus

42

Kegiatan

Tahun 2023 pemerintah telah menyusun konsep Reformasi Birokrasi yang baru yang dinamakan RB Tematik. Perbedaan dengan RB lama yakni hanya berkonsep pada pemenuhan data dukung saja dan belum menyentuh akar persoalan di masyarakat, sedangkan RB tematik harus mampu menyelesaikan persoalan disekelilingnya. Empat fokus RB tematik dengan konsep yang baru yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai kementerian yang mengkoordinasikan 7 K/L di bawah koordinasinya, terus mendorong dan turut mengawal pelaksanaan RB Tematik yang dilaksanakan oleh K/L teknis. Selain itu juga peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam pelaksanaan RB Tematik terdiri dari 5 fokus dan 42 kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023.



Penurunan Tingkat Kemiskinan

2 Kegiatan

Transformasi Digital

3 Kegiatan

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

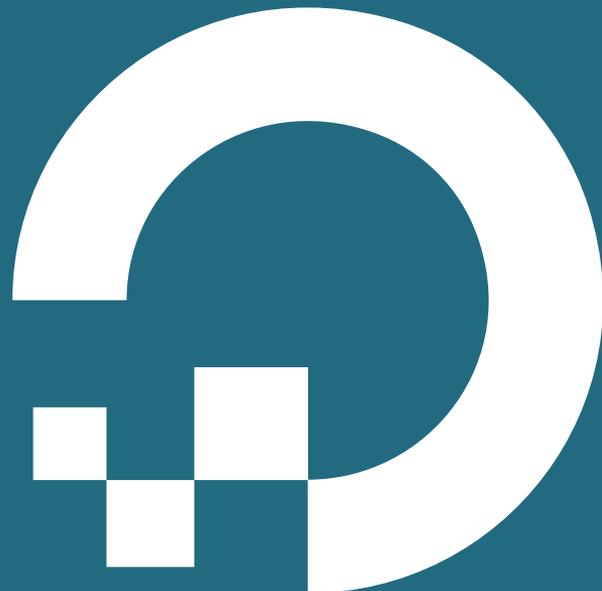
3 Kegiatan

Peningkatan Investasi

6 Kegiatan

Prioritas Presiden

28 Kegiatan



Rincian Kegiatan

RB Tematik Kemenko Marves #1

Penurunan Tingkat Kemiskinan

- Dukungan Pembangunan Jalan Trans di Pulau 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)
- Percepatan Pelaksanaan Perhutanan Sosial
- Mengkoordinasikan peningkatan investasi sektor migas dengan merevisi PP Nomor 27 Tahun 2017 dan Revisi PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang dan Rancangan Perpres Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
- Mengkoordinasikan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam RTRW Provinsi (RTRWP)
- Mengkoordinasikan Kerjasama Pembangunan Seaweed Estate Terintegrasi di Maluku Tenggara
- Koordinasi Pelaksanaan HLDI Indonesia - Korea sebagai Tindak lanjut MoU on the Establishment of the Korea-Indonesia High Level Dialogue on Investment
- Mengkoordinasi Percepatan Proyek PT. Pelabuhan Indonesia Maspion dan Dubai Port World (UAE) senilai 1,2 Miliar US\$
- Mengkoordinasikan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden mengenai tata kelola Mineral kritis dan mineral strategis

Peningkatan Investasi

- Koordinasi Kebijakan terkait Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan
- Koordinasi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- Koordinasi Integrasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk mengatur tata kelola mineral dan batubara

Transformasi Digital

1. Koordinasi Kebijakan terkait Interkoneksi Sistem Informasi Produk Industri Kehutanan
2. Koordinasi Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
3. Koordinasi Integrasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk mengatur tata kelola mineral dan batubara

Prioritas Presiden

- Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian (lifting) Produksi Minyak dan Gas
- Pelaksanaan Koordinasi Inisiasi Ocean20 sebagai Forum Kelautan Global G20
- Mengkoordinasikan akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang di empat lokasi (Aceh Timur, Lampung Selatan, Pinrang dan Sukamara)
- Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penataan dan Pengembangan Stasiun Tanah Abang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penataan Terpadu Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak
- Koordinasi Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
- Dukungan percepatan pengembangan Ibu Kota Nusantara
- Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan Transisi Energi (Debottlenecking Pembangunan Energi Baru Terbarukan)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi/Food Estate

Rincian Kegiatan

RB Tematik Kemenko Marves #2

Prioritas Presiden

- Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menunjang Kebijakan Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi/Food Estate
- Pengawasan Perpres 15 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (PPK DAS Citarum)
- Pencapaian pembangunan pusat persemaian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pencapaian Target National Determined Contribution (NDC) Unconditional
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sampah Terintegrasi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Lima DPSP
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mencapai target 1,2 - 1,4 miliar perjalanan wisnus
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)
- Mengawal Proses Pembangunan Jalan Tol Kapal Betung
- Mengawal Proses Percepatan Kebijakan Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I
- Mengawal Proses PSN Pembangunan Bendungan Margatiga
- Mengawal Proses PSN Pembangunan Bendungan Marangkayu
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Investasi Industri Hijau
- Mendorong beroperasinya Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung tahun 2023
- Mengkoordinasikan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral (smelter)

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya
- Mengoordinasikan Optimalisasi dan Inovasi Penggunaan Reefer Container Buatan Dalam Negeri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri



Capaian

Kinerja Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong peningkatan investasi, agar tidak ada disparitas investasi antara Jawa dan Luar Jawa. Secara keseluruhan nilai investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2023 berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, melonjak 17,5% dibanding 2022 (year-on-year/yoy). Capaian itu juga menyerap tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang, serta melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi.

Target realisasi investasi 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) awalnya sebesar Rp1.099,8 triliun. Presiden Jokowi menaikkan target realisasi investasi 2023 menjadi Rp1.400 triliun. (data per 24/1/2024).

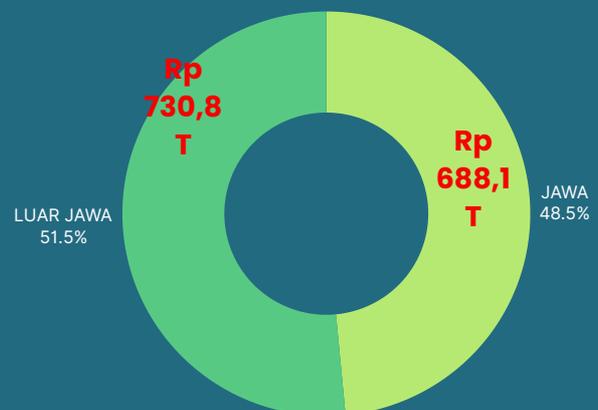
Realisasi investasi pada 2023 terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp744,0 triliun, setara 52,4% dari total realisasi. Kemudian penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp674,9 triliun atau 47,6%. Secara tahunan, realisasi PMA pada 2023 tumbuh 13,7% (yoy), sedangkan PMDN tumbuh 22,1% (yoy).

Berdasarkan wilayah, realisasi investasi di luar Jawa sepanjang 2023 mencapai Rp730,8 triliun atau 51,5% dari total investasi, serta meningkat 14,8% (yoy). Sementara realisasi investasi di Jawa Rp688,1 triliun atau 48,5%, serta melonjak 20,5% (yoy).

Realisasi Investasi Tahun 2023



Sumber: Kemen Investasi/BKPM, 2024



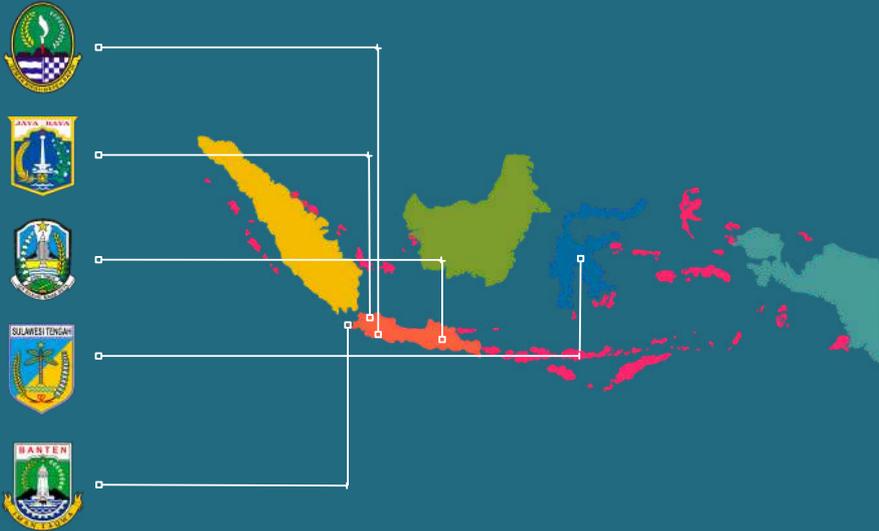
Sumber: Kemen Investasi/BKPM, 2024

Realisasi investasi pada 2023 terdiri dari penanaman modal asing (PMA) Rp744,0 triliun, setara 52,4% dari total realisasi. Kemudian penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp674,9 triliun atau 47,6%. Secara tahunan, realisasi PMA pada 2023 tumbuh 13,7% (yoy), sedangkan PMDN tumbuh 22,1% (yoy).

Berdasarkan wilayah, realisasi investasi di luar Jawa sepanjang 2023 mencapai Rp730,8 triliun atau 51,5% dari total investasi, serta meningkat 14,8% (yoy). Sementara realisasi investasi di Jawa Rp688,1 triliun atau 48,5%, serta melonjak 20,5% (yoy).

Investasi sepanjang 2023 paling banyak masuk ke Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten. Adapun lima negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia adalah Singapura, China, Hong Kong, Jepang dan Malaysia.

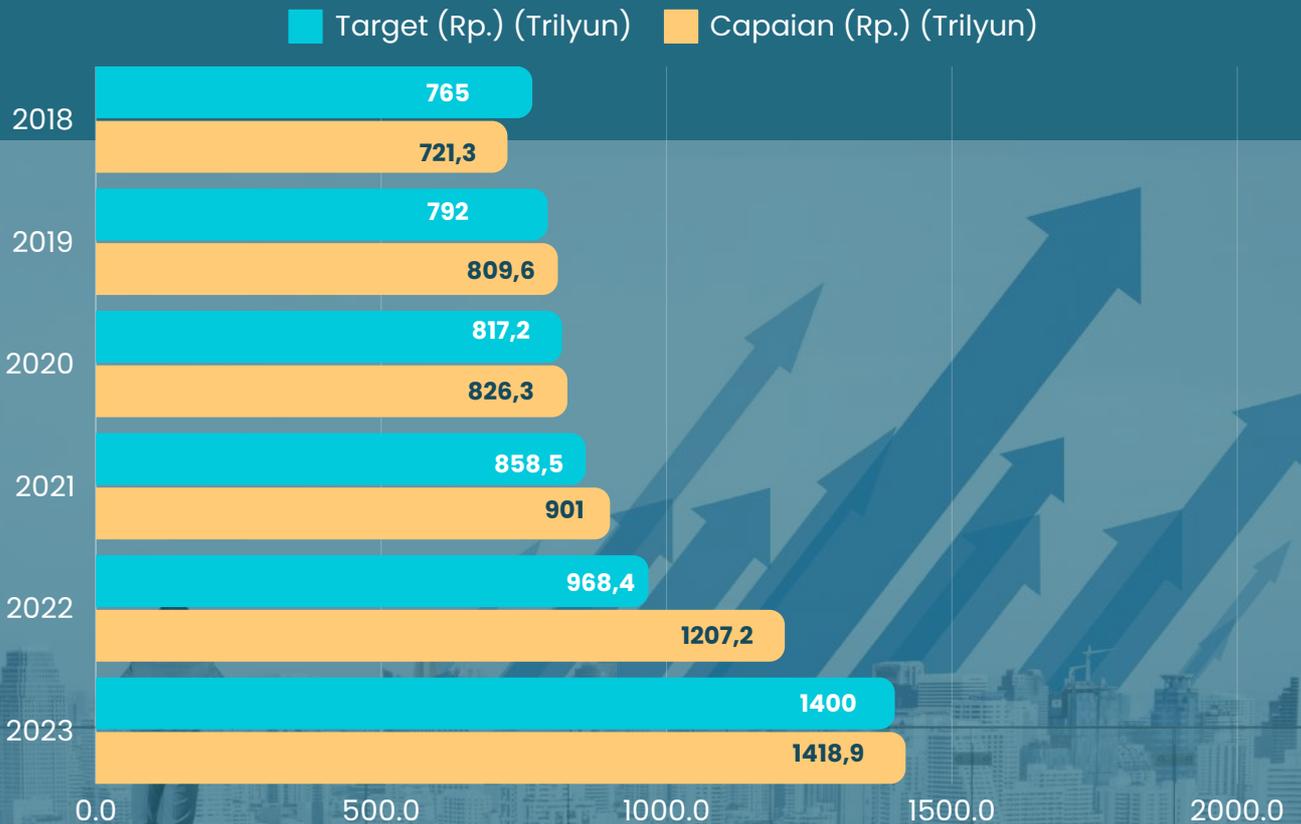
5 Besar Investasi Paling Banyak Masuk



5 Besar Negara Paling Banyak Berinvestasi



Perbandingan Realisasi dan Target Investasi Tahun 2018 s.d 2023



Penugasan Langsung dari Presiden RI



Sumber Daya Air Nasional berdasarkan (Perpres No. 53 Tahun 2022

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 6 April 2022. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Capaian tahun 2023 adalah penyampaian rekomendasi DSDAN kepada Presiden, pengawalan rencana kerja DSDAN Tahun 2023, dan pemilihan anggota DSDAN unsur non-pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai kementerian yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas 7 K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves (KKP, Kemen ESDM, Kemenhub, KLHK, Kemen PUPR, Kemenparekraf, Kemen Investasi/BKPM) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah mendorong dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan major project dan yang ditugaskan langsung oleh Presiden RI.

Sejak tahun 2019, terdapat 30 kegiatan penugasan langsung oleh Presiden RI ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beberapa penugasan langsung tersebut sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan, dan lainnya masih dilaksanakan untuk diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Adapun penugasan langsung tersebut yang masih dilaksanakan sebagai berikut.

32 penugasan Presiden RI ke Menko Marves sejak 2019 s.d 2023



HDCM RI-RRT berdasarkan Arahan Presiden dalam SKP, 2021

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menandatangani MoU Establishing a High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) bersama Wang Yi. Dalam perjanjian tersebut, Luhut dan Menlu China bertindak sebagai Co-Chair HDCM. Hubungan Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan China terutama dalam bidang ekonomi saat ini terus meningkat. Berbagai bidang strategis yang disepakati yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam penyediaan vaksin Covid-19, proyek ekonomi besar, pengembangan digital, dan keamanan laut.



Penandatanganan MoU Establishing a High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM)

Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia – KKI berdasarkan Perpres No. 34 Tahun 2022

Kemenko Marves mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi. Menko Marves menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia – BBI berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2021

- Telah diluncurkan program Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar 1,2 – 1,4 Miliar perjalanan. Dampak langsung adalah pendapatan pariwisata senilai kisaran Rp 3.200 Triliun.
- Temu Bisnis tahap 1 – 4 yang dilakukan oleh berbagai K/L terkait. Temu bisnis bertujuan untuk menjembatani K/L, pemda dengan industri dalam negeri, sehingga dapat mempercepat capaian target senilai Rp 400 Triliun.

Pengendalian Food Estate (FE) berdasarkan Arahan Presiden, Tahun 2021

Pemerintah menetapkan Program Food Estate untuk Peningkatan Cadangan Pangan Nasional di 5 lokasi prioritas. Sejak 2020, Pemerintah menetapkan Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua, NTT, dan Sumatera Selatan sebagai lokasi prioritas pengembangan food estate.

Rencana Pengembangan FE Sumut seluas ± 12.000 ha akan fokus pada tanaman hortikultura. Sampai 2024, target budidaya seluas 1.200 ha pada APL di Kab. Humbang Hasundutan dan Kab. Pakpak Bharat serta skema agroforestry seluas 1.800 ha.



Selain food estate juga dikembangkan Taman Sains Teknologi Hortikultura (TSTH) 1 dan 2. TSTH2 sebagai center of excellent penyedia bibit unggul hortikultura dan peningkatan SDM dalam mendukung FE sumut. Luas area TSTH2 30 Ha di dalam area KHDTK seluas 500 Ha, tahap 1 telah terbangun 11 bangunan dan pada tahap 2 direncanakan untuk dibangun 14 bangunan tersisa. TSTH2 akan menjadi aset Kemen dibudristek yang dioperasikan oleh IT-Del.

Strategi pengembangan TSTH2:

- Pengembangan Sains dan Teknologi Genomik untuk hortikultura dan tanaman herbal Indonesia melalui kerja sama riset dengan mitra dalam dan luar negeri inkubasi teknologi untuk melahirkan start-up.
- Menjadi "hub" dan akselerator riset serta "etalase" potensi hortikultura dan tanaman herbal Indonesia;
- Melakukan "teaching industry" untuk perguruan tinggi dan lembaga terkait;
- Melakukan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari serta meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.



Sarana Pendukung yang Telah Terbangun di TSTH2 Sumut

Kawasan Rebana & Jabar Selatan berdasarkan Perpres 87 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden no 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan di kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan, kegiatan ini dilaksanakan dimana dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada pembangunan perekonomian regional dan nasional. Dilakukan pembangunan di Kawasan REBANA (Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan) dan kawasan Jawa barat bagian Selatan (Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran) perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.

Jawa Barat mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada sebaran tumbuh kembangnya Kawasan industri. Tercatat dari 132 kawasan industri yang telah beroperasi, 71 diantaranya berlokasi di Jawa barat yang menempati kurang lebih 63.100 ha lahan di Jawa Barat. Penyediaan beberapa infrastruktur dasar harus dilakukan dengan koordinasi yang tepat antara lain Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri melalui integrasi dengan sektor lain.

KTT AIS Forum berdasarkan Arahan Presiden, Tahun 2021

Terselenggaranya Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) Tahun 2023 di Bali.

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021

Program ini memiliki rencana aksi berupa Pembangunan Energi Berkelanjutan, dengan rencana aksi jumlah layanan dukungan sektor ketenagalistrikan dalam pencapaian target mitigasi gas rumah kaca sektor energi (rekomendasi); dan Rendah Karbon Pesisir dan Laut.

Capaian:

- telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
- Permen NEK sub sektor ketenaga listrik No 16/2022
- Permen NEK sektor Kehutanan
- PMK tentang Carbon Tax
- Launching bursa karbon pada September 2023.

Penanganan Maluku Lumbung Ikan Nasional – M-LIN berdasarkan Arahan Presiden, Tahun 2021



Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya. Terdapat tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.

KONSEPSI LUMBUNG IKAN NASIONAL

PENGERTIAN LIN :

Lumbung Ikan Nasional adalah Kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan, diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan, dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional.

TUJUAN LIN:

1. Menjamin ketersediaan stok sumber daya ikan yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan peningkatan ekonomi negara, daerah dan masyarakat
3. Mewujudkan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Efisien



SASARAN LIN:

1. Terwujudnya pemanfaatan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
2. Terwujudnya optimalisasi Produksi Penangkapan, Budidaya, dan Pasca Panen Hasil Perikanan
3. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan kelautan dan perikanan.

Proses mengembangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) masih terus dilakukan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait.

Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.

Infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.



Capaian tahun 2023 antara lain:

- Masukan terakhir RPerpres Maluku Lumbung Ikan Nasional dari KKP kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah
- KKP sudah memasukkan usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk M-LIN sebesar 2 triliun rupiah.

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berdasarkan Perpres No. 23 Tahun 2021



Penanganan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres No. 60 Tahun 2021

Danau menjadi salah satu bagian dari ekosistem serta sumber air yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, ekologis serta memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Saat ini, beberapa danau di Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, peningkatan erosi, dan punahnya jenis biota endemik.

DANAU DALAM ANGKA

Berapa jumlah dan luas danau di Indonesia?

840

Indonesia memiliki **840 danau** dengan tipologi sangat bervariasi. Sebagian besar danau di Indonesia merupakan danau alami.

7.103

Total luas seluruh danau mencapai **7.103 km²**. Danau-danau tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua.



Tujuan dari kebijakan satu peta yaitu: 1) Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dari stakeholder yang diakibatkan oleh ketidakseragaman data yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah; Percepatan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang didasarkan atas arahan Presiden dengan mendahulukan penyelesaian hak-hak masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian berinvestasi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Wakil Ketua II Tim KSP yang mengoordinasikan Peta Tematik Kemaritiman. Terkoordinasikannya 53 peta tematik kemaritiman yang memastikan adanya keseragaman dan sinkronisasi antar stakeholder.

15 DANAU PRIORITAS NASIONAL

- | | |
|------------------------|--|
| Danau Toba, Sumut | Danau Singkarak, Sumbar |
| Danau Kerinci, Jambi | Danau Rawapening, Jateng |
| Danau Batur, Bali | Danau Tempe, Sulsel |
| Rawa Danau, Banten | Danau Matano, Sulsel |
| Danau Poso, Sulteng | Danau Limboto, Gorontalo |
| Danau Tondano, Sulut | Danau Sentarum, Kalbar |
| Danau Maninjau, Sumbar | Danau Sentani, Papua |
| | Danau Semayang, Melintang, Jempang, Kaltim |

Sumber: RPJMN 2015-2019



Tujuannya pelaksanaan program yakni meningkatkan nilai indeks kualitas air sebesar 55,50 pada tahun 2024, mengkoordinasikan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional yang telah mengalami degradasi sehingga mengancam kelestarian danau-danau tersebut, serta kesejahteraan masyarakat.

Revitalisasi Tambak Udang berdasarkan Arahan Presiden, tahun 2021

Revitalisasi Saluran Irigasi Tambak Udang di lokasi Aceh Timur, Lampung Selatan, Pinrang dan Sukamara.

Pengendalian Program Tol Laut berdasarkan Perpres No.27 Tahun 2021

Tol laut adalah salah satu cara pemerintah untuk memangkas atau menghilangkan biaya logistic yang terlalu tinggi, meskipun sampai saat ini keberadaan ongkos logistic masih tinggi, tetapi secara langsung negara berupaya agar daerah-daerah tertinggal atau terluar dapat menikmati biaya logistic semurah mungkin. Biaya logistik ditekan serendah mungkin karena biaya logistic sangat mempengaruhi harga barang sehingga secara langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian di daerah.



Biaya logistik yang tinggi akan menyebabkan ketinggian nilai inflasi jika inflasi tinggi maka hal ini akan mengurangi investor atau daya Tarik kepada investor yang akan investasi menjadi kecil atau rendah. Adanya tol laut diharapkan untuk menciptakan pembangunan industri-industri baru di luar pulau Jawa sehingga pada akhirnya bentuk ideal dari tol laut nantinya adalah kapal mampu mengisi palka muatan saat berangkat maupun kembali ke pelabuhan asal.

Tindak Lanjut :

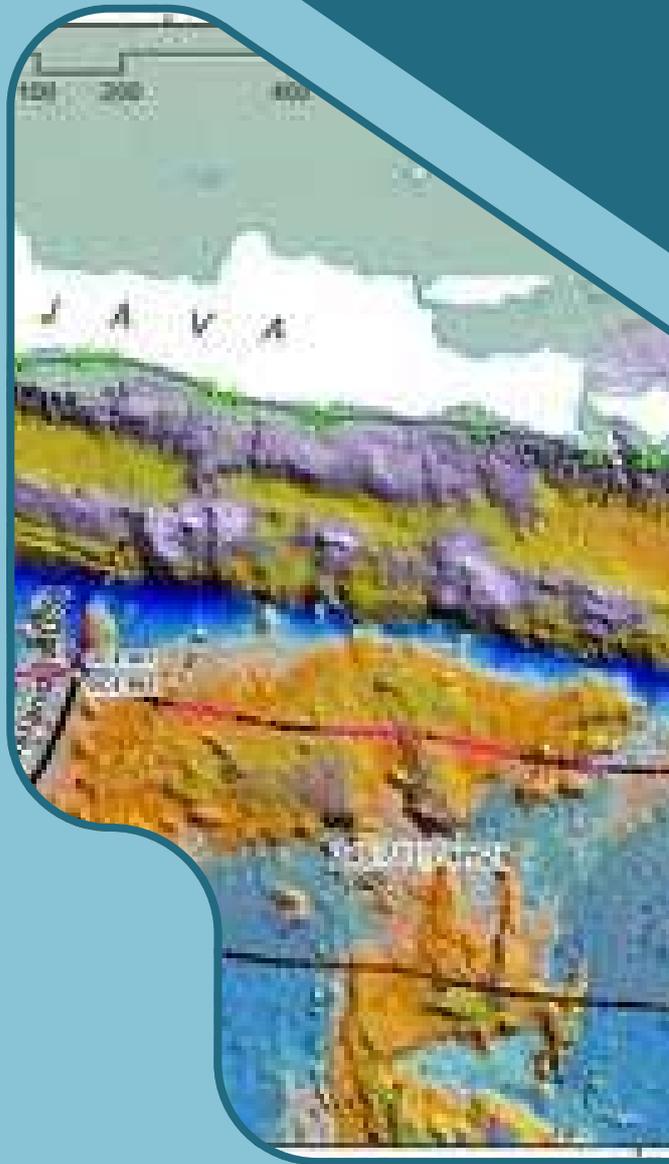
- Mendorong dengan rekomendasi kebijakan untuk menetapkan Trayek Tol Laut baru berdasarkan usulan trayek dari stakeholders yang telah diterima oleh Kementerian Perhubungan.
- Kolaborasi dengan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam melakukan pengawasan.
- Melakukan pengendalian untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
- Mendorong peningkatan muatan balik dengan peran aktif Pemerintah Daerah.
- Mendorong untuk meningkatkan kualitas jaringan internet di daerah 3TP agar dapat mengakses aplikasi SITOLAUT, SIGM dan aplikasi lain yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang.





Penyelesaian Landas Kontinen Indonesia (TNP-LKI) berdasarkan Arahan Presiden tahun 2021

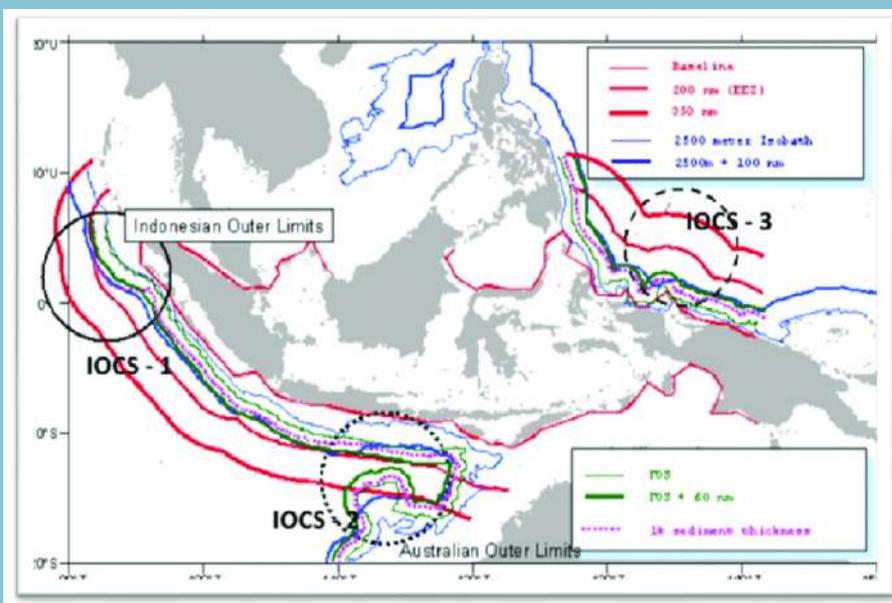
Sebagai negara pihak UNCLOS, Indonesia berhak memperluas landas kontinen di luar 200 M. Hal ini menambah wilayah hak berdaulat dasar laut yang mengandung berbagai sumber daya (mineral, migas, biologis) strategis yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Output dari kebijakan ini adalah Submisi 3 segmen perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua, barat daya Sumatra, dan selatan Jawa – Nusa Tenggara dengan total luas sejumlah 657.886,6 km² atau kurang lebih setara dengan sepertiga dari total luas daratan Indonesia. Progress capaian Proses submisi tiga segmen telah tersampaikan oleh PBB. Dalam proses pembahasan lanjutan di Komisi Batas Landas Kontinen PBB.



Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyampaikan dokumen submisi klaim perluasan landas kontinen di luar 200 mil laut, untuk area selatan Jawa – Nusa Tenggara kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (11-08-2022). Secara formal, dokumen submisi disampaikan oleh Duta Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan klaim submisi tersebut, Indonesia berpotensi memperluas landas kontinennya seluas 245.711 km². Keseluruhan submisi tersebut, Indonesia berpeluang untuk untuk mendapatkan perluasan landas kontinen seluas 657,886.6 km², atau sekitar 1,5 kali luas Pulau Sumatera.

Submisi perluasan landas kontinen Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki hak untuk menambah luasan landas kontinennya.



Pengendalian Blue Infrastructure Terintegrasi berdasarkan Perpres No.109 Tahun 2020

Tujuan program yakni Mengintegrasikan konsep blue infrastructure yang terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Pada program ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan sebagai Ketua DAU yang mempunyai tugas fungsi pengendali.

Capaian tahun 2023:

- Sosialisasi konsep blue infrastructure melalui tulisan karya ilmiah/ kajian yang berjudul "Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Biru (Blue Infrastructure) dalam Pengamanan Pesisir Terpadu yang Menyejahterakan". Tulisan karya ilmiah/ kajian ini dimuat dalam buku berjudul "Pengembangan Konsep Maritim 2045";
- Mensosialisasikan konsep blue infrastructure melalui forum diskusi antar stakeholder dan akademisi (Blue Infrastructure Network Initiative-BINI Webinar Series Session I-V)
- Mensosialisasikan konsep blue infrastructure melalui forum internasional "The 4th ASEAN-India Workshop on Blue Economy dan Joint Task Force on Connectivity Development between Aceh and Andaman-Nicobar" di India



Pengendalian Pelaksanaan MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional berdasarkan Perpres No.109 Tahun 2020

• Pelaksanaan MP Jalan Trans Pulau 3T

Rekomendasi kebijakan telah ditindaklanjuti dengan adanya progres percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, sebagai berikut: Fisik Realisasi : 51,886%; Jalan: 45,658%; Jembatan : 64,770%

• Pengendalian Pelaksanaan MP Jalan Tol Nasional

Indonesia telah mempercepat pembangunan jalan tol secara signifikan dalam 9 tahun terakhir melalui Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera. Pembangunan Jalan Tol rentang waktu tahun 1978 – 2014 dengan panjang 775 km, meningkat menjadi 1,848 km pada rentang tahun 2014 – 2023. Indonesia memiliki rencana rinci pembangunan total 18 ribu km jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Indonesia pada tahun 2050.

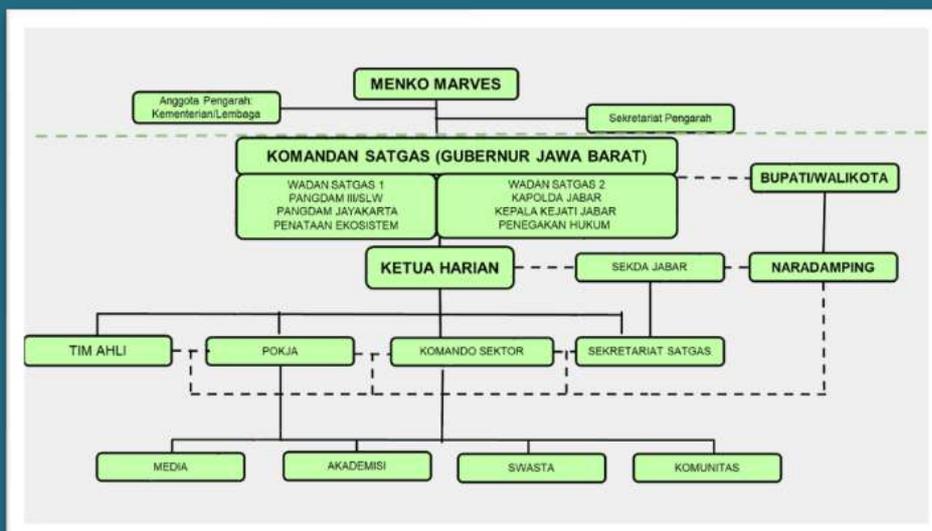
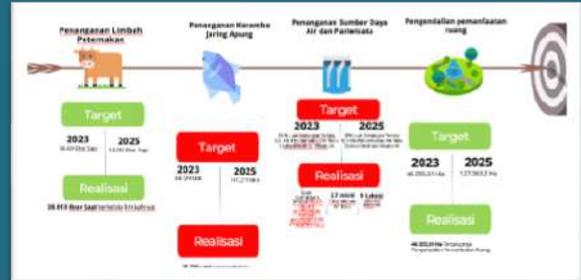
Pengendalian Penanganan DAS Citarum berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2018

Citarum Menjadi Perhatian Presiden RI target 7 Tahun Restorasi DAS Citarum Selesai. "Pertengahan Januari 2018 akan kita mulai dari hulu ke hilir perbaikan, revitalisasi yang ada di Sungai Citarum, karena dari informasi dan data bahwa Citarum sangat kotor, Pembenahan total sampai selesai baik berupa revitalisasi lahan dan hal-hal berkaitan anak sungai, limbah pabrik kita lihat menyeluruh. Agar Citarum betul-betul bermanfaat bagi pertanian, air baku akan kembali bersih dinikmati untuk kehidupan", (Joko Widodo, Presiden RI).

Upaya yang dilakukan Kemenko Marves guna percepatan mewujudkan Citarum Harum melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, serta mendorong untuk:

- Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dengan Rencana Aksi Pembangunan Fasilitas pengolahan air limbah di DAS Citarum dengan kriteria keberhasilan yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum.
- Saat ini telah terbangun dan beroperasi Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum sebanyak 10 unit yang berlokasi di Kota Bandung, Subang, Bandung Barat dan Cianjur.
- Kondisi DAS Citarum yang dinobatkan menjadi sungai terkotor di dunia dengan permasalahan lahan kritis di hulu, endapan di sepanjang sungai, dan persampahan.

Capaian tahun 2023:



Peran Kemenko Marves dalam penanganan Citarum

Percepatan Program KBLBB berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2019

Kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik mulai diberlakukan pada 20 Maret 2023. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Perpres itu menyebutkan bahwa program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan.

Tahun 2023, peran Kemenko Marves, antara lain:

- Mengkoordinasikan kebijakan yang mendukung pengembangan KBLBB antara lain: Revisi Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan
- Menyelaraskan kebijakan dan regulasi teknis KBLBB antar-lembaga antara lain Kemenkeu, Perindustrian, Kemen Investasi, ESDM, Kemendagri, Kemenhub dan Pemerintah Daerah.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang KBLBB melalui kegiatan webinar, seminar, media brief dan roadshow
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan KBLBB dalam maupun luar negeri seperti perusahaan otomotif, perusahaan energi, lembaga penelitian, asosiasi, dan komunitas



- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan KBLBB dalam maupun luar negeri seperti perusahaan otomotif, perusahaan energi, lembaga penelitian, asosiasi, dan komunitas
- Mendorong pemerintah memberikan bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
- Mendorong penggunaan TKDN (40%) pada kendaraan listrik.

bantuan pemerintah untuk KBLBB Roda Dua Konversi:



- 24 bengkel konversi telah memiliki sertifikat bengkel konversi Kemenhub
- 6 bengkel konversi terdaftar di Kemen ESDM
- 3.207 unit, Pendaftar subsidi pemerintah untuk konversi (per Juni 2023)
- 8 unit, dalam proses

Pengendalian Geopark Berdasarkan Perpres No.9 Tahun 2019

Indonesia menjadi negara dengan UNESCO Global Geopark terbanyak di Asia Tenggara. Saat ini, terdapat enam UNESCO Global Geopark yang tersebar di Sumatera Utara, Belitung, Jawa Barat, NTB, dan Bali. Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan Geopark di Indonesia untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal..

Anggaran pengelolaan UNESCO Global Geopark masih terbatas dan belum optimalnya peranan pemerintah daerah untuk mengelola kawasan strategis tersebut. Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pengembangan geopark sebagai destinasi berkelanjutan melalui (a) konservasi, (b) edukasi, dan (c) pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kemenko Marves berkomitmen untuk terus mensukseskan pengembangan geopark di Indonesia. Sebagai implementasi atas komitmen tersebut, pada September 2022 telah dilaksanakan kegiatan 1st UNESCO Global Geopark Youth Forum di Geopark Batur. Kegiatan merumuskan Piagam Batur sebagai bentuk komitmen para pemuda dalam menangani perubahan iklim global.

**Kemenko Marves
berkomitmen untuk terus
mensukseskan
pengembangan geopark di
Indonesia**



Pengendalian Pelaksanaan TP3DN berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 2018



Kinerja sektor industri dalam negeri memerlukan dukungan kebijakan iklim usaha yang kondusif, yang dapat dilakukan melalui kebijakan dalam mendorong penciptaan pangsa pasar yang stabil bagi produk hasil industri dalam negeri. Pemerintah mendorong gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Telah diselesaikan kebijakan:

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tim P3DN lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN

Integrasi dan Digitalisasi Pengadaan :

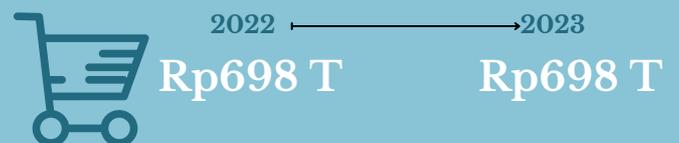
- kode KBLI dan KBKI sudah mengalir ke dashboard LKPP,
- penyederhanaan syarat e-katalog,
- integrasi E-Catalog dengan SIINAS, dan ke KKPD/KKI.

Tindak lanjut tahun 2024:

- Penyusunan SOP dan Program Kerja Kelompok Kerja Pemantauan P3DN;
- Pemantauan perencanaan pengadaan barang/jasa K/L/Pemda/BUMN;
- Pemantauan perencanaan pengadaan barang/jasa pada proyek strategis PT. Pertamina dan PT. PLN;
- Harmonisasi kebijakan dalam rangka mendukung pemantauan P3DN;
- Penyelesaian pelaporan permasalahan dugaan pelanggaran P3DN;
- Pengesahan dan penetapan RUU PBJ.

Capaian 2023

Peningkatan Realisasi Belanja PDN



Peningkatan Jumlah Produk di e-Katalog



Pertumbuhan Ekonomi

Q1 - Q3 2023



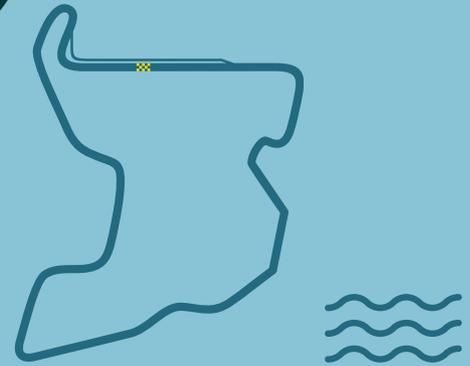
Penyerapan Tenaga Kerja

Q1 2023



Pengendalian Pengembangan 5 DPSP Berdasarkan: Perpres No. 49 Tahun 2016

- Berhasil mendorong terlaksananya FI Powerboat dan Aquabike di Danau Toba
- Berhasil mendorong terlaksananya WSBK dan MotoGP di Mandalika
- terbitnya Perpres RIDPN Surat Edaran Bersama Laporan hasil penilaian



Penanganan Sampah Laut berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2018

Sampah laut merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani secara terintegrasi, karena telah memberi dampak negatif pada sektor pariwisata, lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya pembersihan sampah juga memerlukan biaya yang cukup besar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Kemenko Marves fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan plastic debris, penyusunan dan analisis PDB Kemaritiman untuk formulasi kebijakan.

Capaian tahun 2023:

- Tercapainya kolaborasi dengan Sungai Watch untuk penanganan sampah di sungai dengan jaring sampah di Bali
- Telah disusun Record of Discussion (RoD) antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan KOICA untuk implementasi penanganan sampah dengan metode jaring sampah dan capacity building di Kab. Tangerang.
- 105 jaring sampah telah terpasang di Bali dan berhasil mengangkat 350 ton sampah plasti

5 langkah aksi Kemenko Marves

- Assesment terhadap hotspot dari marine plastic debris dan kota dari sumber sampah tersebut;
- Design kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah di perkotaan untuk memastikan tidak ada leakage sampah ke lautan;
- Pengurangan pembuangan sampah dan plastik dari kegiatan operasi di laut;
- Pengurangan dari sampah, plastik dan polutan lainnya yang sudah ada di lautan, serta
- Pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan manusia.

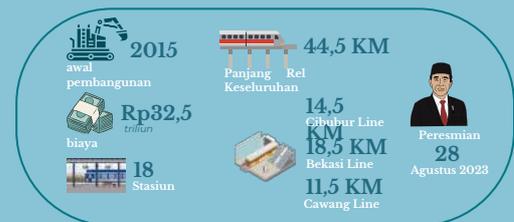




Proyek LRT Jabodebek

Light Rail Transit (LRT) sebagai angkutan massal yang kini dalam tahap pembangunan di Indonesia, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang ada. Karenanya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.



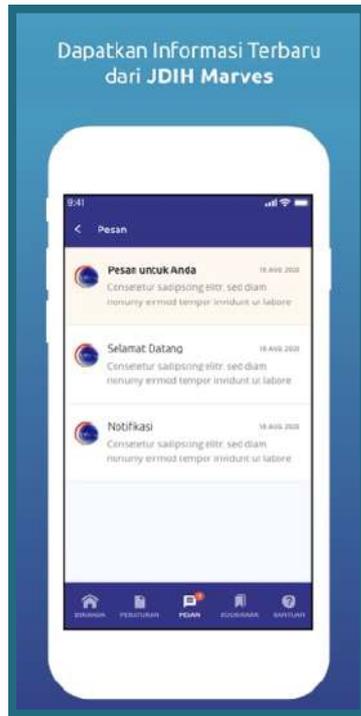
Ketua Satgas Penanganan Polusi Udara

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, pada tanggal 28 Agustus 2023. Terdapat sejumlah kendala dalam penanganan polusi udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, salah satunya adalah minimnya potensi hujan dalam beberapa waktu ke depan. Padahal, salah satu strategi penanganan polusi adalah dengan membuat hujan buatan.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- melibatkan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian atau Prospera, hasil riset Prospera untuk mengatasi polusi.
- mendorong pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek mengeluarkan kebijakan untuk uji emisi kendaraan.
- Percepat penggunaan kendaraan listrik, fokus mengurangi polusi udara dari sektor transportasi.
- menekan polusi dari sektor industri khususnya yang masih memakai pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap alias dari batu bara.
- mengolah sampah jadi listrik.

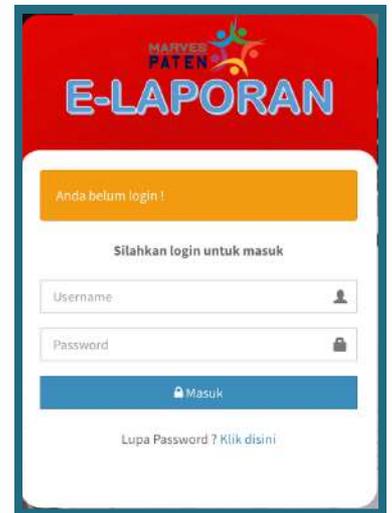




Inovasi

KEMENKO MARVES

Beberapa inovasi yang dikembangkan Kemenko Marves diantaranya:



Inovasi MARVES #1



- **MARVES CORE**

Administrasi dan monitoring kehadiran pegawai serta presensi elektronik berbasis mobile, sehingga memudahkan pegawai kemenko marves.

- **JDIH WEBSITE & MOBILE**

Publikasi dan dokumentasi produk hukum yang dapat diakses oleh publik.

- **MARVES HUMAN RESOURCES**

Pengelola data kepegawaian berbasis aplikasi (seperti pengurusan kepangkatan, berkala dan pensiun) sehingga memudahkan dalam menjaga dokumen pegawai dan proses pengurusan administrasi kepegawaian.

- **SISTEM INFORMASI KINERJA – MARITIM**

Pengelolaan kinerja berbasis sistem informasi yang dapat memantau capaian kinerja dan data dukung seluruh unit kerja.

- **E-REFORMASI BIROKRASI**

Pengumpulan bukti dukung RB terpusat sehingga tersimpan rapi dan berkelanjutan, memudahkan unit kerja untuk mencari bukti dukung, tim penilai internal/inspektorat dalam memberikan penilaian, dan KemenpanRB dalam memeriksa bukti dukung dan penilaian.

- **E-ORGANISASI**

Keseragaman sekaligus memudahkan pelaksanaan monitoring dalam updating data atas pelaksanaan Anjab ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- **E-TATA LAKSANA**

Sistem informasi yang berfungsi sebagai penyusunan dan moneyv SOP.

- **PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI ASPIRASI KEMARITIMAN**

Sarana pengaduan dan aspirasi berbasis website yang dapat diakses oleh publik.

- **SISTEM PENATAUSAHAAN ANGGARAN TERPADU**

Sistem pengelolaan anggaran internal

- **APLIKASI GEOSPASIAL KEMARITIMAN**

Menyajikan informasi kebumian atau aspek keruangan dengan koordinat tertentu seperti peta jalur koridor kabel laut, peta lahan garam Indonesia, peta labuh jangkar, peta kawasan konservasi, peta pulau-pulau kecil terluar dll.

- **LAYANAN PENGADUAN PUNGLI PELABUHAN**

Layanan yang memungkinkan publik untuk dapat melaporkan kegiatan pungli di pelabuhan

- **LAYANAN PELAPORAN PENELANTARAN PELAUT DAN AWAK KAPAL PERIKANAN (AKP) INDONESIA**

Menyediakan form pelaporan yang dapat digunakan oleh pelaut dan AKP Indonesia untuk melaporkan kasus penelantaran, seperti pelanggaran HAM maupun hak-hak ketenagakerjaan yang dialaminya, baik di luar maupun dalam negeri.



Inovasi MARVES #2

- **LAYANAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT**

Layanan pengaduan terkait aktivitas di pelayaran rakyat serta microsite pelayaran rakyat juga sebagai layanan informasi (regulasi, data base, dll.) terkait pelayaran rakyat

- **SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGETAHUAN**

Sistem informasi berbasis website yang mendukung manajemen pengetahuan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga setiap pegawai dapat mengetahui progres kegiatan dan analisa data dari seluruh unit kerja.

- **APLIKASI UNTUK DATABASE SMELTER MELALUI INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM FOR INDONESIAN MINERAL-DOWNSTREAMING STAKEHOLDERS (ICOS FOR IMDOS)**

1. Sinkronisasi data antara KESDM, Kemenperin, dan Kemeninves/BKPM.
2. Validitas tinggi karena data yang terkumpul merupakan data primer.
3. Kualitas perumusan bahan kebijakan meningkat karena didukung oleh data yang komprehensif.
4. Data yang terkumpul dapat dipakainya oleh seluruh K/L.

- **APLIKASI HI'IN (HI ISPEKTORAT)**

Aplikasi konsultasi internal Marves terkait pengawasan dan pendampingan di internal Kemenko Marves di no WA 081250085006

- **TIM COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (CSIRT)**

Tim atau entitas yang terdiri atas, para praktisi cyber di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menyediakan dukungan dan layanan untuk mencegah, mengelola, dan menanggapi adanya insiden-insiden dalam bidang keamanan informasi komputer

- **APLIKASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ASPIRASI KEMARITIMAN (PESAN)**

Aplikasi pengelolaan, pengawasan laporan aspirasi dan aduan dari masyarakat yang tertuang secara baik dan maksimal.

- **SISTEM PELAPORKAN PELANGGARAN HUKUM (SPPH) MARVES**

Aplikasi Sistem Pelaporan Pelanggaran Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menyampaikan aspirasi melalui kontak Whatsapp nomor 0813-3334-1723

- **APLIKASI E-PIPAKABEL**

Alat untuk transparansi dan monitoring evaluasi pelaksanaan proses perizinan pipa kabel bawah laut di Indonesia.



Prestasi

Tahun 2023



- Juara 1 Kementerian dan Lembaga dengan Indeks Implementasi BerAKHLAK, juara 1 Indeks Implementasi Akuntabel dan juara 1 Indeks Implementasi Adaptif, ACT Consulting International, 2023.
- The Biggest Improvement dan The Highest Score kategori Kementerian dalam acara Appreciation Day (ASN Culture Festival 2023 oleh KemenPanRB).
- Peringkat 4 Indeks Reformasi Hukum (IRH) (Skor 96) (Pemberian Penghargaan IRH Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM RI).
- Penghargaan JDIHN Awards 4 tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022, 2023), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards 2023, (oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023).
- Penghargaan Apresiasi K/L Pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 (RBXperience dan Coaching Clinic, KemenPanRB, 2023).
- Penerima Apresiasi Revolusi Mental 2023, Gerakan Indonesia Bersih, Anugerah Revolusi Mental 2023, Kemenko PMK
- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023 (2020,2021,2022,2023), Komisi Informasi Publik (KIP)
- Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub-Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik., Anugerah Humas Indonesia 2022.
- Menko Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Digital 2022, Anugerah Humas Indonesia 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI sebagai Pemenang Institusi Terpopuler di Media Digital 2022, Anugerah Humas Indonesia 2022.
- Opini BPK Watar Tanpa Pengecualian (BPK) sejak tahun 2016 s.d 2023.



Analisa

Sumber Daya

• Sumber Daya Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi per program tahun 2023 yaitu sebesar 99,11% dengan nilai Rp338.940.911.012,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp341.990.713.000,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)

SS 1: Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing

1. IKU Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)

Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp17.446.968.000,00. Realisasi Rp17.433.323.655,00 (99,92%). Efisiensi anggaran sebesar Rp13.644.345,00 (0,8%).

IKU Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional memiliki capaian kinerja 102,86%.

2. IKU Indeks Kepemimpinan Maritim

Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp66.325.821.000,00. Realisasi Rp66.244.179.099,00 (99,88%).

Efisiensi anggaran sebesar Rp81.641.901,00 (0,12%), IKU Indeks Kepemimpinan Maritim memiliki capaian kinerja 100%.

SS 2: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif Dan Efisien

3. IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp2.562.143.000,00. Realisasi Rp2.560.697.660,00 (99,94%).

Efisiensi anggaran sebesar Rp1.445.340,00 (0,06%), IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti 100%.

4. IKU Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan

Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp2.562.143.000,00. Realisasi Rp2.560.697.660,00 (99,94%).

Efisiensi anggaran sebesar Rp1.445.340,00 (0,06%), IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti 100%.

SS 3: Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas

5. IKU Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Jumlah pagu pada IKU ini sebesar Rp592.760.000,00. Realisasi Rp592.756.850,00 (99,99%).

Efisiensi anggaran sebesar Rp3.150,00 (0,001%). IKU Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 95,98%.



Penyederhaan Birokrasi (Delayering)



Menindaklanjuti perkembangan kebijakan nasional, dari tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan implementasi delayering sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Tata Usaha pada unit Deputi dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis
2. Kepala Bagian Keuangan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
3. Kepala Bagian Data dan Informasi dialihkan menjadi Pranata Komputer
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Arsiparis
5. Kepala Bagian Program dialihkan menjadi jabatan fungsional perencana
6. Kepala Bidang substantif pada unit kerja dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Delayering pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari sisi struktur organisasi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

• Efisiensi Anggaran



Tahun 2023, Kemenko Marves melakukan efisiensi sebesar Rp4.096.233.012,00 atau sebesar 0,89% yaitu keseluruhan belanja tahun 2023., dari pagu anggaran sebesar Rp341.990.713.000,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) dengan tingkat peyerapan anggaran sebesar 99,11% dengan nilai Rp338.940.911.012,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas rupiah)



• Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna



Kemenko Marves melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Marves (server, storage, jaringan, dan lain-lain untuk common application) dan perangkat pengguna Kemenko Marves (Personal Computer dan tablet). Namun, karena adanya peraturan terbaru (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional), sehingga Kemenko Marves melakukan penyesuaian regulasi yang baru.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

• Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW

Penataan ruang kerja berdasarkan konsep Activity Based Workplace (ABW) sebagai bagian dari program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, program Inisiatif Strategis Kemenko Marves, dan Implementasi program Ruang Kerja Masa Depan, dilakukan asesmen penataan ruang kerja.

Pembagian ruang kerja

Sekretariat Kemenko	Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim & Energi
Biro Perencanaan	Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim
Biro Hukum	Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur & Transportasi
Biro Komunikasi	Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan & Kehutanan
Biro Umum	Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Lobby	Deputi Koordinasi Bidang Investasi & Pertambangan
Ruang Gym	
Klinik	
Ruang Rapat	
Ruang PPID	
Ruang Musik	
Parkir Area	

• Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur tentang pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh pengadaan barang/jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

• Implementasi Aplikasi



Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Marves yakni SIK-MARVES (e-SAKIP MARVES), Marves Core, Marves HR, MARVES Dalam Angka, JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum) Kemenko Marves, Aplikasi Monitoring Food Estate, Sistem Informasi Pemantauan dan Manajemen Program Investasi Strategis (Project Control Monitoring/PCM), dan Satu Garpu..

Selain implementasi Aplikasi yang dibuat oleh Internal Kemenko Marves, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Marves juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal, seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan SMART DJA yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

• Implementasi Kebijakan SDM



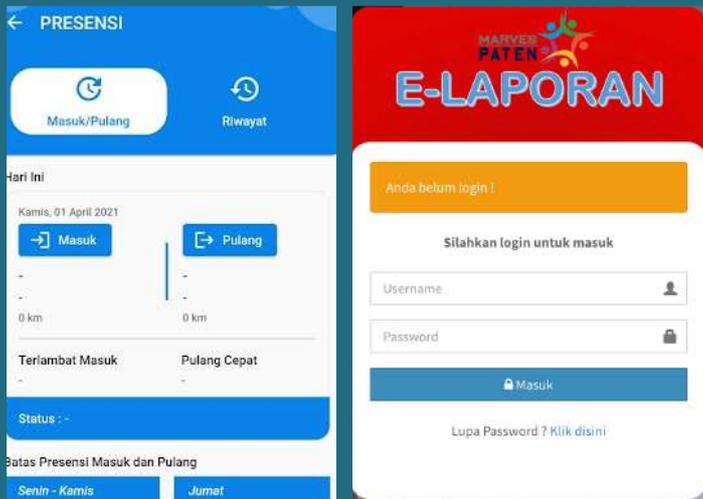
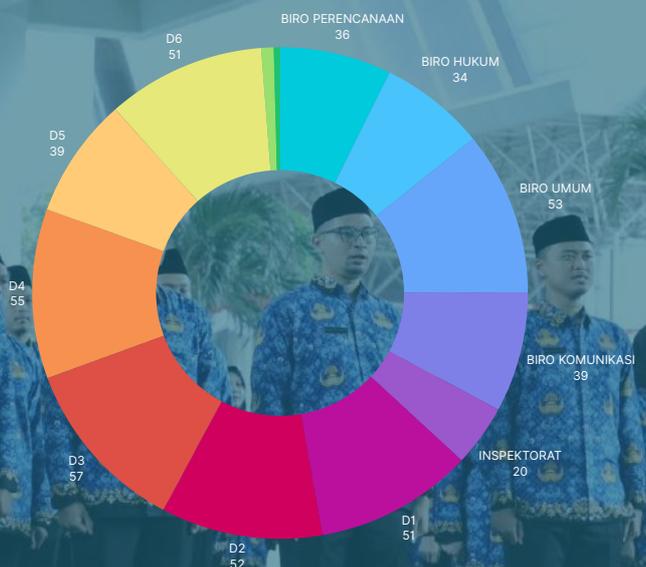
Tahun 2023 Kemenko Marves tidak melaksanakan rekrutmen CPNS dan P3K, hal ini dikarenakan mengikuti kebijakan dari KemenPAN&RB.

Rekrutmen ASN di tahun 2022 sebanyak 75 orang dan saat ini telah dilaksanakan pelantikan menjadi PNS yang telah dilantik saat ini mengisi formasi kebutuhan pada unit kerja eselon I di lingkungan Kemenko Marves.

Sebaran PNS pada unit kerja:

	Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim & Energi	7	pegawai
	Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim	7	pegawai
	Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur & Transportasi	6	pegawai
	Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan & Kehutanan	13	pegawai
	Deputi Koordinasi Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif	5	pegawai
	Deputi Koordinasi Bidang Investasi & Pertambangan	12	pegawai
	Sekretariat Kemenko	25	pegawai

redistribusi pegawai tahun 2023





Penutup



IKJ KEMENKO MARVES TAHUN 2023

Penutup

Kesimpulan

- Laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun ketiga periode 2020–2024. Laporan ini menyajikan target yang berhasil dicapai pada tahun 2023.
- Secara umum, Capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023 sebesar 99,96%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022, karena adanya perubahan konsep perjanjian kinerja yang mempengaruhi hasil kinerja akhir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi per program tahun 2023 yaitu sebesar 99,11% dengan nilai Rp338.940.911.012,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu dua belas rupiah) atau 99,11% dari pagu anggaran sebesar Rp341.990.713.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- Data dukung capaian pada link berikut: <https://bit.ly/BUKTIDUKUNGLKJ2023>

Tindak lanjut

- Memperkuat koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas capaian kinerja pada tahun mendatang, dengan pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
- Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja yang akan ditargetkan pada tahun 2024.
- Melakukan perbaikan atas rencana aksi dari program dan kegiatan yang belum tercapai pada tahun 2023 guna pencapaian target kinerja pada tahun 2024 atau akhir Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Upaya menarik investasi di semua wilayah terus dilakukan untuk mewujudkan pemerataan penyebaran investasi berkualitas.



BIRO PERENCANAAN
TIM PENYUSUN

